

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu disusun untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); \

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOWUTARATAHUN2019.

Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen laporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019.



Pasal 2

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 11 1-1\UAP.1 ;JO~0  
BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

  
DEPRIPONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 11 ~lt(J.1ftt :v»D  
SEKRETARISDAERAH  
KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA,

  
ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH  
TAHUN 2020

OLAANGMONGONDOWUTARA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **t1** TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2019

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2019**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



## Ikhtisar Eksekutif

*Bismillahir Rahmannirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahii Wabarokaatuh*

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 ini menyajikan informasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 atas pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah melalui 8 Sasaran Strategis diukur dari realisasi 23 Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruhnya mencapai kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 108,02% dalam kategori Sangat Berhasil.

Secara garis besar hasil analisis capaian kinerja dapat kami sajikan dalam tabel analisis sebagai berikut:

Tabel. 1

Rangkuman Hasil Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Sangat Berhasil	7	7	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2.	Berhasil	0	9	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3.	Cukup Berhasil	0	1	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4.	Kurang Berhasil	0	3	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara



				program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.
5.	Tidak Ada Informasi (n.a)	1	3	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	23	

Berdasarkan tabel analisis diatas, bahwa kinerja tahun 2019 sangat berhasil, efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya, serta inovatif dalam pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh 7 indikator kinerja utama yang dikategorikan sangat berhasil, 9 indikator kategori berhasil, 1 indikator kategori cukup berhasil serta 3 indikator kategori kurang berhasil;
2. Meningkatnya angka perkapita Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 sebesar 11,91 juta rupiah per tahun (PDRB-ADHK/ BPS);
3. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2018 sebesar 99,86%;
4. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2019 dengan realisasi sebesar 67,21 Tahun, jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar 66,98 Tahun, terjadi kenaikan sebesar 0,31 Tahun, hal ini menunjukkan bahwa pola hidup sehat di masyarakat bolaang mongondow utara semakin baik.

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis tahun 2019 menurut misi, dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel.2

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Setiap Misi

N o	Pernyataan Misi Dalam RPJMD		Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6
1.	Misi I	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	1	4	9	95,86
2.	Misi II	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);	1	2	4	107,17



3.	Misi III	Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	1	1	6	96,53
4.	Misi IV	Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal	1	1	4	135,80
Capaian rata-rata Kinerja setiap misi						<b>108,02</b>

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian sasaran strategis rata-rata dalam kategori sangat berhasil.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 8 sasaran menunjukkan 14 (empat belas) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP tahun 2019, telah dalam proses tindaklanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2020.

Demikian, mudah-mudahan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih maju dalam kancah pembangunan daerah serta lebih menciptakan Bolaang Mongondow Utara yang berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan berdaya saing.

*TerimaKasih,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*"Mopopiana, Mototabiana Agu Mononandobana"*



## Daftar Isi

Peraturan Bupati tentang LKjIP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019	
Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019	
Pernyataan Reviu LKjIP Tahun 2019	
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Potensi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	2
1.3. Kewenangan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan .....	3
1.4. Organisasi Perangkat Daerah .....	5
1.5. Isu strategis (Strategic Issued) .....	7
1.6. Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2019 .....	11
2.1.1 V i s i.....	11
2.1.2 M i s i.....	11
2.1.3 Tujuan .....	12
2.1.4 Sasaran Strategis .....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2018-2023 .....	16
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 .....	19
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	21
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	33
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 .....	35
3.3. Analisis Kinerja Tahun 2019.....	40
3.4. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019 .....	78
<b>BAB IV Penutup</b>	
A. Kesimpulan .....	95



B. Peluang Perbaikan..... 96

***Lampiran-lampiran (e-SAKIP):***

1. RPJMD 2018-2023
2. RKPD 2019
3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Rencana Strategis (RS)
5. Renja
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
8. Rencana Aksi Tahun 2020
9. Laporan kompilasi hasil evaluasi AKIP
10. Katalog PERBUP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019
11. Katalog PERDA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019
12. Prestasi dan Penghargaan terhadap kinerja dan inovasi tahun 2019



## Daftar Tabel

### Ikhtisar Eksekutif

Tabel 1	Hasil analisis kinerja sasaran tahun 2019.....	XII
Tabel 2	Evaluasi capaian kinerja .....	XIII

### BAB I

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk.....	3
Tabel 1.2	Susunan Organisasi.....	6

### BAB II

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Tahun 2018-2023.....	13
Tabel 2.2	Matriks hubungan Visi, Misi dan Tujuan.....	14
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023.....	16
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 .....	20
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	21
Tabel 2.6	Rencana Program dan Anggaran Tahun 2019 .....	23

### BAB III

Tabel 3.1	Skala interval, ordinal dan pernyataan capaian kinerja .....	34
Tabel 3.2	Pencapaian kinerja setiap misi .....	35
Tabel 3.3	Pengukuran kinerja tahun 2019 .....	36
Tabel 3.4	Capaian kinerja misi per sasaran tahun 2019 .....	37
Tabel 3.5	Rangkuman hasil analisis capaian kinerja tahun 2019.....	38
Tabel 3.6	Efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran.....	39
Tabel 3.7	Capaian kinerja tujuan .....	41
Tabel 3.8	Analisis indikator tujuan menurunnya tingkat kemiskinan .....	44
Tabel 3.9	Analisis indikator tujuan Rasio Ketergantungan.....	45
Tabel 3.10	Analisis indikator tujuan indeks reformasi birokrasi.....	48
Tabel 3.11	Analisis indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi.....	50
Tabel 3.12	Analisis indikator tujuan indeks kepuasan layanan infrastruktur .....	51
Tabel 3.13	Analisis Sasaran 1 .....	53
Tabel 3.14	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan.....	55
Tabel 3.15	Meningkatnya mutu pendidikan .....	56
Tabel 3.16	Analisis Sasaran 2 .....	57



Tabel 3.17	Jumlah sarpras pelayanan kesehatan .....	60
Tabel 3.18	Analisis Sasaran 3 .....	61
Tabel 3.19	Analisis Sasaran 4 .....	63
Tabel 3.20	Partisipasi angkatan kerja .....	63
Tabel 3.21	Analisis Sasaran 5 .....	65
Tabel 3.22	Analisis Sasaran 6 .....	70
Tabel 3.23	Analisis Sasaran 7 .....	71
Tabel 3.24	Analisis Sasaran 8 .....	73
Tabel 3.25	IPAL yang terbangun .....	74
Tabel 3.26	Universal access .....	75
Tabel 3.27	Kualitas lingkungan .....	77
Tabel 3.28	Capaian PAD tahun 2019 .....	79
Tabel 3.29	Capaian pendapatan transfer .....	80
Tabel 3.30	Capaian lain-lain pendapatan daerah (hibah) .....	80
Tabel 3.31	Capaian lain-lain pendapatan daerah .....	81
Tabel 3.32	Anggaran dan Realisasi belanja tidak langsung .....	82
Tabel 3.33	Anggaran dan Realisasi belanja langsung .....	83
Tabel 3.34	Anggaran dan Realisasi belanja langsung dan tidak langsung .....	84
Tabel 3.35	Proporsi Anggaran dan Realisasi belanja langsung dan tidak langsung .....	84
Tabel 3.36	Realisasi dan efisiensi anggaran 2019 per program .....	85

#### **BAB IV**

Tabel 4.1	Rangkuman hasil Analisis capaian kinerja tahun 2019 .....	96
-----------	---	----



## Daftar Grafik

Grafik 1.1	Luas wilayah perkecamatan .....	2
Grafik 3.1	Perkembangan IPM .....	43
Grafik 3.2	Tingkat kemiskinan .....	44
Grafik 3.3	Defendency ratio .....	46
Grafik 3.4	PDRB kabupaten Bolmut.....	49
Grafik 3.5	Rata-rata lama sekolah.....	54
Grafik 3.6	Angka Harapan Hidup .....	59
Grafik 3.7	Partisipasi angkatan kerja.....	64
Grafik 3.8	Predikat SAKIP.....	70



## Daftar Gambar

Gambar 3.1	Rumus Komparasi .....	33
Gambar 3.2	Bupati Bolmut menerima penghargaan SAKIP Award.....	68
Gambar 3.2	Bupati Bolmut menerima LHE .....	69



## Kata Pengantar

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, *Allah SWT* atas petunjuk dan bimbingan-Nya semata sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019**, sebagai dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan amanat peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam upaya *Good Governance & Clean Government* yaitu Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 terealisasi dengan capaian **kinerja Sangat Berhasil**, tingkat capaian sebesar **108,02%**.



Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara
- Bab IV Penutup Lampiran memuat Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2019.

Aspek lain yang menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan adalah beberapa prestasi yang diperoleh selama tahun 2019, seperti prestasi dibidang kesehatan masyarakat dengan predikat Swasti Saba Wistara, prestasi BKD Award bidang pelayanan pensiun, Kabupaten Pengelolah ADD Terbaik. dll (terlampir).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019 ini, untuk menjadi bahan evaluasi dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja tahun 2020.

Terima kasih.

*Mopopiana, Mototabiana 'agu Mononandobana.*

Boroko, Maret 2020

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**DEPRI PONTOH**



# BAB I Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

**B**erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dan reviu kinerja. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan SAKIP tahun 2019 telah menyusun:

- (1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai dasar rencana pembangunan tahun 2019;
- (3) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bolaang Mongondow Utara tahun 2019.
- (4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor Tahun 2019.



Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2019 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

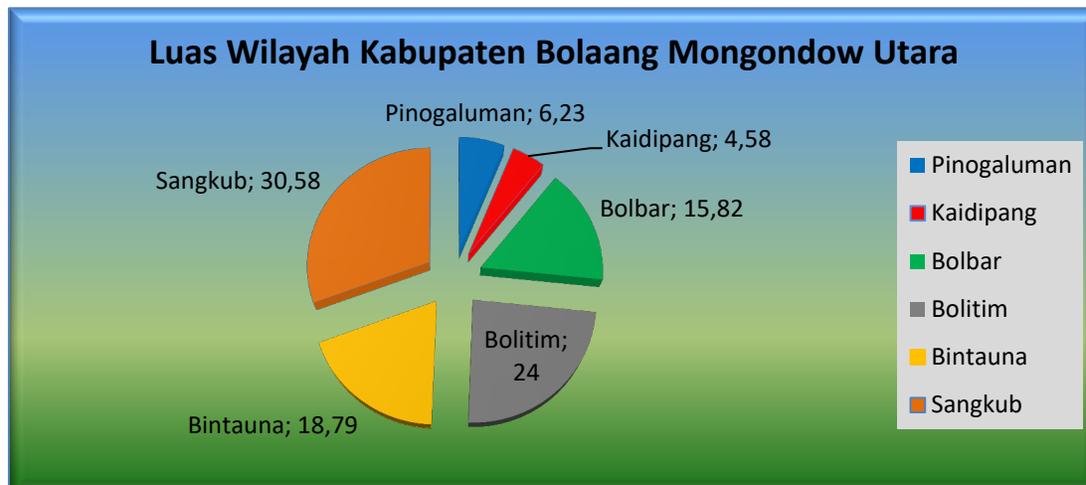
## 1.2. Potensi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, letak astronomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah yang terletak di garis Khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah berupa daratan seluas 1.856,86 km<sup>2</sup>. Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Sangkub (567,85 Km<sup>2</sup>), Bintauna (348,94 Km<sup>2</sup>), Bolangitang Timur (445,64 Km<sup>2</sup>), Bolangitang Barat (293,75 Km<sup>2</sup>) , Kaidipang (85,09 Km<sup>2</sup>) dan Pinogaluman (115,59 Km<sup>2</sup>).

Grafik 1.1

Luas Wilayah Per Kecamatan





Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.

Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 79.366 jiwa yang terdiri atas 40.704 jiwa penduduk laki-laki dan 38.662 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,28 %.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	Tahun			
		2016	2017	2018	(2017-2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sangkub	10.054	10.238	10.406	1.640
2.	Bintauna	12.261	12.176	12.069	-0.880
3.	Bolangitang Timur	14.093	14.281	14.445	1.15
4.	Bolangitang Barat	15.708	15.972	16.208	1.48
5.	Kaidipang	14.882	15.321	15.744	2.76
6.	Pinogaluman	10.385	10.449	10.494	0.43
<b>Bolaang Mongondow Utara</b>		<b>77.383</b>	<b>78.437</b>	<b>79.366</b>	<b>6.58</b>

(sumber BPS)

### 1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

#### A. Kedudukan

Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Kabupaten dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Melalui Gubernur.



Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

## **B. Kewajiban**

Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

## **C. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;



5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Organisasi Perangkat Daerah**

##### **A. Sekretariat Daerah Kabupaten**

- *Kedudukan*

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- *Fungsi*

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **B. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah**

- *Kedudukan*

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



- *Fungsi*

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**C. Dinas-dinas**

- *Kedudukan*

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

**D. Lembaga Teknis Daerah**

- *Kedudukan*

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- *Tugas Pokok*

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan daerah dibidangnya.

**E. Struktur Organisasi**

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

Tabel 1.2.  
Susunan Organisasi

No.	Susunan Organisasi	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Dinas Daerah	20
4.	Lembaga Teknis Daerah	7
	<b>Jumlah Total</b>	<b>29</b>

#### 1.5. Isu Strategis (*Strategis Issued*)

Isu Strategis adalah suatu proses identifikasi lingkungan strategis dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam pemerintahan. Setelah melakukan proses identifikasi dari berbagai faktor, maka dirumuskan beberapa isu strategis sebagai bagian dari rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan kinerja PDRB;
2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 6,29%;
3. Sistem pelayanan investasi melalui teknologi informasi;
4. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi;
5. Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
6. Perluasan kesempatan kerja;
7. Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Mutu pelayanan kesehatan;
9. Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal;
10. Peningkatan pemerataan mutu pendidikan;
11. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal;



12. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi;
13. Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya;
14. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
15. Pengembangan IPTEK untuk pertanian berbasis sains dan TI;
16. Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana;
17. Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kondisi alam;
18. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih kurang;
19. Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan struktur ruang;
20. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan struktur ruang;
21. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah;
22. Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan maupun non hutan;
23. Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis;
24. Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan;
25. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik;
26. Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil;
27. Pengembangan energi listrik baru terbarukan;
28. Pengembangan energi listrik berbasis masyarakat;
29. Pelayanan kepada masyarakat secara *on-line*;
30. Pemanfaatan media komunikasi guna peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi dan fasilitasi kegiatan penyiaran;
31. Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung pengembangan ekonomi;
32. Penegasan batas teritorial wilayah penangkapan;
33. Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat;
34. Pengelolaan sampah mandiri;
35. Pengembangan bio-energi;



36. Pelaksanaan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*);
37. Pencemaran air laut;
38. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas;
39. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait *globalisasi* dan *civil society*;
40. Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsif hukum;
41. Mewujudkan sinergi antar pelaku politik;
42. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik;
43. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.

#### **1.6. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja organisasi diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya capaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun berkenaan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana sistematika penyusunan LKIP dibawah ini:

Surat Keputusan Penyusunan LKIP

Surat Pernyataan Reviu

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

#### **Bab I – Pendahuluan,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;



## **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja,**

menjelaskan secara ringkas perencanaan strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

## **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016,**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **Bab IV – Penutup,**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **Lampiran :**



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2019

**R**encana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah. Hal ini diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Secara garis besar perencanaan kinerja jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

***"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing."***

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. *Berkelanjutan* memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. *Mandiri*, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian



- sebagai basis perekonomian daerah dalam rangkapengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. *Berbudaya* memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan local yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
  4. *Berdaya Saing* memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2. Misi

Dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

### 2.1.3. Tujuan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia :  
Kualitas sumberdaya manusia masih tergolong rendah yakni 65,60 pada tahun 2017, ditargetkan meningkat menjadi 66,23 pada tahun 2023.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani :  
Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menjawab tuntutan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga itu seluruh prioritas area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi akan konsisten dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan :  
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka dan berkualitas diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga ditargetkan pertumbuhan yang positif terus terjaga hingga pada angka 6,24 persen pada tahun 2023.



4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan :

Kualitas lingkungan menjadi syarat mutlak yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dari aspek kuantitas sampai dengan tahun 2023 tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang ditargetkan sesuai dengan arahan indikasi program utama.

#### 2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ditetapkan untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, dimana sasaran strategis dapat menunjukkan ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis jangka menengah tahun 2018 - 2023

No	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat;
4.	Menurunnya beban pengeluaran keluarga;
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6.	Meningkatnya pelayanan public;
7.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local; dan
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel sbb:



Tabel 2.2  
Matriks Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Tahun					Korylisi Akhir Tahun 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya Saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	11,89	11,91	11,97	11,99	12,02	12,04	12,04
			2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,92	7,96	8,03	8,07	8,41	8,52	8,52
			3 Angka Melek Huruf	tahun	99,61	99,62	99,68	99,70	99,91	99,91	99,91
			4 Angka kelulusan SD/MI sederajat	persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			5 Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	persen	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6 Angka Harapan Hidup	tahun	66,99	67,03	67,17	67,23	67,36	67,41	67,41	
		Meningkatnya daya beli masyarakat	7 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (daya beli)	juta/rupiah	8,732	8,871	9,010	9,149	9,288	9,427	9,427
			8 Gini Ratio	point	0,35	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27
		9 Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,71	4,69	4,58	4,43	4,38	4,24	4,24	
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2 Nilai LPPD	point	2.8364	2.9370	2.9500	3.0000	3.0025	3,0100	3.0350
			3 Nilai LKIP	opini	C	CC	B	BB	BB	A	A
		4 Indeks pelayanan publik	point	3,27	3,30	3,33	3,33	3,40	3,43	3,43	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3. Meningkatkan Daya Saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal	1 Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	persen	29,14	30,97	32,80	34,63	36,46	38,29	38,29	
			2 Nilai Tukar Petani	persen	94,56	95-100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
			3 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	8,60	9,14	9,68	10,22	10,76	11,30	11,30	
			4 Nilai Tukar Nelayan	persen	98,56	100	>100	>100	>100	>100	>100	*100
			5 Kontribusi sektor Akomodasi, dan Makan Minum terhadap PDRB	persen	0,2.9	0,30	0,37	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50
			6 Kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (sektor jasa lainnya)	persen	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	1 <i>Cakupan Universal Acces</i>	persen	67,85	74,28	80,71	87,14	93,57	100,00	100,00	
			2 Persentase Pemenuhan Infrastruktur	persen	70,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	72,13	
			3 Persentase kepatuhan terhadap RTRW	persen	79,38	83,00	86,00	89,00	90,00	90,00	90,00	
			4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen.	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00	



## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan saran/arahan serta coaching klinik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan Tim) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diringkas, dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga indikator kinerja sasaran semula berjumlah 160 indikator kinerja utama menjadi 22 indikator kinerja utama (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023.

Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama 2018-2023

SASARAN (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)
1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dikbud
	1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dikbud
	1.3 Angka Melek Huruf (AMH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulas ipengukuran : Jumla hpenduduk (usia diatas 15 tahun) yang bias menulis pada tahun : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dikbud



(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4 Angka kelulusan SD/MI sederajat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran :Jumlah lulusan jenjang pendidikan SD/MI : Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dikbud
	1.5 Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran :Jumlah lulusan jenjang pendidikan SMP/MTs : Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SMP/MTs x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dikbud
2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bias menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dinkes
3 Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Dayabeli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t : IHK tahun t x 100</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Bapelitbang
	3.2 Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Bapelitbang
4 Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran :Jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Naker
5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1 Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran :Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	BPKD
	5.2 Nilai LPPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Hasil penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Setda



(1)	(2)	(3)	(4)
	5.3 Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Setda
6 Meningkatnya pelayanan publik	6.1 Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan public tahun n-1</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Setda
7 Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : PDRB sector pertanian : Total PDRB x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Distan
	7.2 Nilai Tukar Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Indeks yang diterima petani : Indeks yang dibayar petani x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Distan
	7.3 Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector perikanan : Total PDRB x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	DKP
	7.4 Nilai Tukar Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : Indeks yang diterima nelayan : Indeks yang dibayar nelayan x 100</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	DKP
	7.5 Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : PDRB sector akomodasi dan makan minum : Total PDRB x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dispar
	7.6 Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector kesenian, hiburan dan rekreasi : Total PDRB sector jasa lainnya x 100%</li> <li>▶ Tipe Perhitungan : Absolut</li> </ul>	Dispar



(1)	(2)	(3)	(4)
8 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berbatasan lingkungan	8.1 Cakupan <i>Universal Acces</i>	Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100%	PUPR
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
	8.2 Persentase pemenuhan infrastruktur	▶ Formulasi Pengukuran : Persentase ketersediaan jalan kondisi mantap + Persentase daerah irigasi kabupaten kondisi baik : 2 x 100%	PUPR
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
	8.3 Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	▶ Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100%	Perkim
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
	8.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	▶ Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	DLHK
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Upaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, maka sistem akuntabilitas disusun dengan cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atas pertanggungjawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RPJMD, dapat kami sajikan dibawah ini :

Tabel 2.4  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,89
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	7,92
		3	Angka Melek Hurup (AMH)	%	99,61
		4	Angka kelulusan SD/MI sederajat	%	100
		5	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	%	99,50
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	66,99
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8,732
		8	Gini Ratio	%	61,18
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,69
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	opini	WTP
		11	Nilai LPPD	Poin	2.9370
		12	Nilai SAKIP	status	CC
6	Meningkatnya pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,30
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	30,97
		15	Nilai Tukar Petani	%	95
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,14
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	100
		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,30
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan	%	0,70



			Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)		
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	74,28
		21	Persentase pemenuhan infrastruktur	%	71,50
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	83
		23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	33,33

#### 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk melaksanakan dan mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selengkapnya dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,89
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	7,92
		3	Angka Melek Hurup (AMH)	%	99,61
		4	Angka kelulusan SD/MI sederajat	%	100
		5	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	%	99,50
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	66,99
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8,732
		8	Gini Ratio	%	61,18



4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,69
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	opini	WTP
		11	Nilai LPPD	Poin	2.9370
		12	Nilai SAKIP	status	CC
6	Meningkatnya pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,30
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	30,97
		15	Nilai Tukar Petani	%	95
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,14
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	100
		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,30
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,70
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	74,28
		21	Persentase pemenuhan infrastruktur	%	71,50
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	83
		23.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	33,33

- Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 sebesar Rp. 677.294.651.578,00
- Rencana belanja langsung sebesar Rp.356.863389298,27
- Rencana belanja tidak langsung sebesar Rp.341.332.419.566,51

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah;



- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan
- 4) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuat penetapan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun, sebagaimana sasaran strategi dan indikator kinerja sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019.

Tabel 2.6  
Rencana Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43,683,686,451.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36,324,811,065.27
3	Program peningkatan disiplin aparatur	859,716,200.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,599,289,720.00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,085,142,100.00
6	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	37,136,861,000.00
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7,602,134,400.00
8	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,687,000,400.00
9	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	4,639,281,500.00
10	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	494,085,300.00
11	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45,434,000.00
12	Program peningkatan pelayanan kedinasan wakil kepala daerah	3,575,461,450.00



13	Program peningkatan iman dan taqwa	1,151,667,100.00
14	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	66,649,600.00
15	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	77,167,000.00
16	Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem Dan Prosedur Organisasi	130,229,700.00
17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	413,356,400.00
18	Program Keluarga Berencana	3,453,054,775.00
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,767,430,500.00
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	909,212,700.00
21	Program pembangunan jalan dan jembatan	4,229,055,000.00
22	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,376,956,800.00
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	920,119,500.00
24	Program Penataan Administrasi Kependudukan	900,204,000.00
25	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	125,355,000.00
26	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,902,709,700.00
27	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	231,000,000.00
28	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	11,933,200.00
29	Program pengembangan data/informasi	286,054,000.00
30	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	141,190,500.00
31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,959,292,400.00



32	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	159,353,600.00
33	Program Pengembangan Nilai Budaya	789,937,400.00
34	Program pengembangan pemasaran pariwisata	659,818,400.00
35	Program Pengembangan Perumahan	349,723,250.00
36	Program pengembangan wilayah transmigrasi	47,495,700.00
37	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,575,557,350.00
38	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,877,150.00
39	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	68,845,700.00
40	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	224,188,400.00
41	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	215,407,600.00
42	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1,483,773,543.00
43	Program Kerjasama Pembangunan	212,696,100.00
44	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	201,983,600.00
45	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,793,882,000.00
46	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0.00
47	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	170,399,000.00
48	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	191,196,600.00
49	Program pengembangan destinasi pariwisata	2,888,121,000.00
50	Program pengembangan industri kecil dan menengah	244,194,900.00



51	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	102,433,800.00
52	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	75,841,200.00
53	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	819,504,800.00
54	Program peningkatan peran serta kepemudaan	874,111,400.00
55	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	8,100,000.00
56	Program Transmigrasi lokal	82,796,900.00
57	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26,919,050,396.00
58	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19,146,023,000.00
59	Program peningkatan pelayanan angkutan	78,759,650.00
60	Program Kepala Daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga	56,189,600.00
61	Program pelayanan kontrasepsi	44,028,000.00
62	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2,207,262,050.00
63	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	43,272,700.00
64	Program Pengawasan Obat dan Makanan	67,441,600.00
65	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	224,764,600.00
66	Program pengembangan Kemitraan	206,846,400.00
67	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	103,263,600.00
68	Program pengembangan wawasan kebangsaan	87,497,500.00



69	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,852,050,200.00
70	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	493,931,400.00
71	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	33,799,200.00
72	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	748,424,590.00
73	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	33,463,300.00
74	Program kerjasama informasi dengan mas media	1,586,500,000.00
75	Program pelayanan perizinan	22,313,100.00
76	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	220,283,200.00
77	Program Pendidikan Non Formal	4,478,380,700.00
78	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	19,163,200.00
79	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	24,999,500.00
80	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	253,739,225.00
81	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	13,912,500.00
82	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	407,706,950.00
83	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	130,000,000.00
84	Program E-Government aplikasi dan pengembangan informatika	1,036,079,482.00



85	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1,682,400.00
86	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	113,760,000.00
87	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	45,000,000.00
88	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	114,378,400.00
89	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	271,583,200.00
90	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	256,159,900.00
91	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3,559,165,940.00
92	Program peningkatan sumber daya manusia pariwisata	521,736,000.00
93	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	249,403,325.00
94	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	546,822,700.00
95	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	17,814,400.00
96	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1,659,831,000.00
97	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	505,639,000.00
98	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	370,918,200.00
99	Program pengembangan budidaya perikanan	933,070,890.00
100	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1,328,963,200.00



101	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,562,599,800.00
102	Program penyederhanaan proses perizinan	40,061,500.00
103	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	426,381,900.00
104	Program perlindungan dan pemenuhan hak anak	0.00
105	Program Daerah Agraria	60,228,000.00
106	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	88,406,200.00
107	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	506,308,600.00
108	Program pendidikan politik masyarakat	27,900,000.00
109	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	238,297,900.00
110	Program pengembangan perikanan tangkap	2,141,108,200.00
111	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	34,555,000.00
112	Program perencanaan pembangunan daerah	2,278,683,650.00
113	Program perlindungan hak perempuan	161,809,650.00
114	Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial	509,278,500.00
115	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,229,975,000.00
116	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	965,714,100.00
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat	412,044,200.00
118	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1,178,639,000.00
119	Program perencanaan pembangunan ekonomi	318,578,600.00



120	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar	10,962,539,645.00
121	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	64,651,500.00
122	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	329,950,000.00
123	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	117,066,200.00
124	Program perencanaan sosial dan budaya	281,147,200.00
125	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	202,935,400.00
126	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	148,401,500.00
127	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1,984,801,000.00
128	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	10,784,998,034.00
129	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	38,532,733,970.00
130	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	250,000,000.00
131	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	50,000,000.00
132	Program Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat penampungan Sementara	30,000,000.00
133	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5,956,631,402.00



134	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	10,527,671,900.00
135	Program Pengendalian Banjir	597,802,000.00
136	Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial pangan	197,485,000.00
137	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4,325,719,145.00
138	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	115,746,600.00
139	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	34,078,200.00
140	Program Perencanaan Tata Ruang	2,854,267,500.00
141	Program Pemanfaatan Ruang	315,800,000.00
142	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	739,365,400.00
143	Program penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	187,172,850.00
<b>JUMLAH</b>		<b>356,863,389,298.27</b>



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Asas penyelenggaraan negara telah banyak berubah, terutama sistem manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini, dimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarahkan setiap pemerintah daerah menganut asas akuntabilitas kinerja.

Makna asas akuntabilitas inilah yang telah merubah paradigma manajemen pemerintahan selama ini yang hanya berfokus kepada akuntabilitas keuangan saja, yaitu pertanggungjawaban instansi pemerintah cukup dengan menyajikan informasi realisasi anggaran yang penilaian laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Oleh sebab itu evaluasi kinerja dan evaluasi efisiensi keuangan sudah pada tingkatan penilaian laporan kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB.RI)

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian terhadap target memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

Dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Bab ini akan disajikan uraian analisis pencapaian kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2019. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program-program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Adapun skala interval dan predikat capaian kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala interval dan Predikat Capaian Kinerja

Nomor	Bobot Capaian	Predikat
1	2	3
1.	> 95 %	Sangat Berhasil
2.	80 - 95 %	Berhasil
3.	50 - < 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2019 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD tahun 2018-2023 melalui tujuan dan sasaran kinerja.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada uraian realisasi 4 (empat) misi, 4 (empat) tujuan, 8 (delapan) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama, diperoleh capaian kinerja sasaran setiap misi diuraikan dalam table sebagai berikut:



Tabel. 3.2  
Capaian Kinerja Setiap Misi

No	Pernyataan Misi Dalam RPJMD		Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6
1.	Misi I	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	1	4	9	95,86
2.	Misi II	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);	1	2	4	107,17
3.	Misi III	Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	1	1	6	96,53
4.	Misi IV	Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal	1	1	4	135,80
Capaian rata-rata Kinerja setiap misi						<b>108,02</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran kinerja sasaran strategis setiap Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 adalah **108,02%**, atau capaian kinerja **kategori Sangat Berhasil**.

### 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran inidituangkan dalam skala interval dan skala ordinal dengan diinterpretasikan dalam pernyataan capaian, sebagai berikut:

Berikut ini diuraikan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2019, sebagai berikut:



Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,89	11,91	100,17
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,16	8,27	101,35
		3	Angka Melek Hurup (AMH)	%	100	99,86	99,86
		4	Angka kelulusan SD/MI sederajat	%	100	98,62	99,62
		5	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	%	100	97,76	99,76
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	66,99	67,21	100,33
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8,87	8,99	101,36
		8	Gini Ratio	%	0,32	0,37	84,38
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,69	4,62	101,49
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	predikat	4,00	4,00	100
		11	Nilai LPPD	Poin	2.937	3.040	103,51
		12	Nilai SAKIP	status	4,00	4,00	100
6	Meningkatnya pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,30	n.a	n.a
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	30,97	43,76	141,31
		15	Nilai Tukar Petani	%	95	94,33	99,29
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,14	7,23	79,10
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	100	108,11	108,11



		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,30	0,28	93,31
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,70	0,80	113,61
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	74,28	79	106,35
		21	Persentase pemenuhan infrastruktur	%	71,50	71,50	100
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	83,00	79,00	95,18
		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	33,33	80,55	241,67

Adapun hasil analisis capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis tahun 2019 dijabarkan setiap misi diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.4

Capaian Kinerja Misi Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR OR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4	5
<b>MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia</b>				
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	5	99,55	SANGAT BERHASIL
2.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,33	SANGAT BERHASIL
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	2	92,87	BERHASIL
4.	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	1	101,49	SANGAT BERHASIL
<b>MISI II : Memantapkan tatakelolah Pemerintahan</b>				



1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	3	101,17	SANGAT BERHASIL
6.	Meningkatnya pelayanan publik	1	n.a	-
<b>MISI III : Meningkatkan DayaSaing Ekonomi Berbasis Pertanian</b>				
7.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan	6	105,12	SANGAT BERHASIL
<b>MISI IV : Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>				
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	4	135,80	SANGAT BERHASIL
Total / Rata-Rata		23	107,51	SANGAT BERHASIL

Keberhasilan capaian kinerja ini selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan yang diinginkan. Hasil analisis ini merupakan dasar perbaikan bagi kami untuk meningkatkan kinerja kedepan, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta efektifitas penggunaan sumberdaya dan anggaran.

Rangkuman hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 dapat kami uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Rangkuman hasil Analisis Capaian Kinerja Sasaran

N o	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
1	2	3	4	5
1.	Sangat Berhasil	7	7	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2.	Berhasil	0	9	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3.	Cukup Berhasil	0	1	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan



				integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4.	Kurang Berhasil	0	3	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.
5.	Tidak Ada Informasi (n.a)	1	3	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	23	

Berdasarkan tabel analisis diatas, terdapat 3 sasaran dan 7 indikator dalam kategori sangat berhasil, sedangkan 8 sasaran dan 9 indikator berada pada kategori berhasil, untuk 3 sasaran dan 1 indikator masuk kategori cukup berhasil, serta 3 sasaran dan 1 indikator kategori kurang berhasil.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian sasaran strategis dengan persentase penyerapan anggaran, dapat disampaikan pada table sebagai berikut:

Tabel 3.6

Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Startegis

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	96.66 %	110.274.718.713	96.970.480.285	87.94	EFISIEN
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	119.64 %	75.730.941.944	68.937.301.442	91.03	EFISIEN
3.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	99.95 %	11.575.262.318	9.187.454.973	79.37	EFISIEN



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga	111.20 %	1.657.862.650	1.651.882.173	99.64	EFISIEN
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	105.02 %	22.292.522.603	20.710.181.265	92.90	EFISIEN
6.	Meningkatnya Pelayanan Publik	51.92 %	5.773.945.267	5.134.477.681	88.92	EFISIEN
7.	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah/Lokal	92.53 %	57.863.754.870	51.115.061.221	88.34	EFISIEN
8.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	115.26 %	63.428.947.360	62.457.621.339	98.47	EFISIEN

### 3.3. Analisis Kinerja Tahun 2019

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai diatas, analisis dilakukan terhadap realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Penjelasan-penjelasan mengenai komponen operasionalisasi kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya yang dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja.

Dibawah ini kami uraikan hasil analisis dan evaluasi tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 setelah dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan terhadap 6 (enam) indikator dimana 1 (satu) indikator lainnya yakni Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur belum dilakukan penghitungan pada tahun 2019. Hasil pengukuran kinerja tujuan dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	65,74	65.81	66.91	101.67	66.23
	Tingkat Kemiskinan	persen	8,89	8.60	8.45	101.74	8.11
	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	persen	61,18	61.15	36.18	148.83	60.87
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	55,00	57.00	60.05	105.35	62.00
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	persen	6,18	6.20	6.18	99.68	6.24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	67,57	68,43	n.a	n.a	74,79
<b>Rata - Rata Capaian</b>						<b>109.86</b>	

Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa caoaian kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2019 rata-rata mencapai 109,86% atau kategori capaian kinerja **Sangat Berhasil**.



## Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia diukur dengan 3 (tiga) indikator yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan dan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) dengan rata-rata capaian tujuan 1 yakni 101,67% atau kategori capaian kinerja **Sangat Berhasil**.

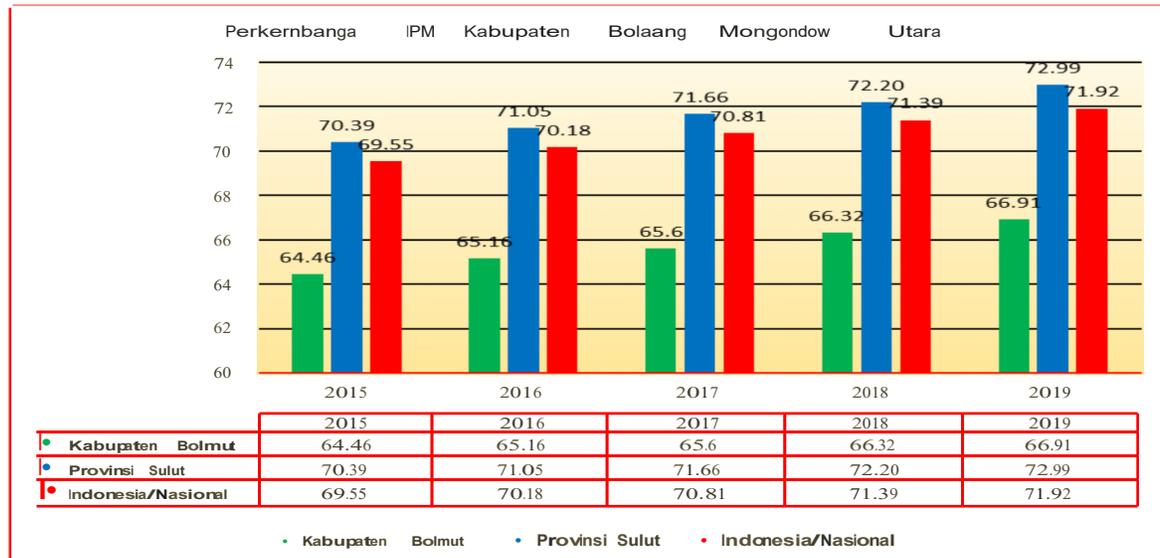
*Indeks Pembangunan Manusia* merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong kategori sedang walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni peningkatan dari 65,74 pada tahun 2018 menjadi 66,91 pada tahun 2019. Sedangkan kinerja tahun 2019 sendiri tercapai 101,67% dari target yang direncanakan.

Peningkatan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan). Sampai dengan tahun 2019 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih berada pada peringkat ke 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, masih dibawah IPM provinsi dan nasional. Dengan semakin meningkatnya penyediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dari aspek kualitas dan maupun kuantitasnya diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk IPM dari aspek kesehatan dan pendidikan. Komponen pembentuk IPM lainnya yakni standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita diupayakan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama lima tahun terakhir yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 :



Grafik 3.1 perkembangan IPM

Dimensi terakhir kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator *pengeluaran perkapita (daya beli)* pada tahun 2018 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai Rp. 11,91 juta per tahun atau meningkat Rp. 300 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.



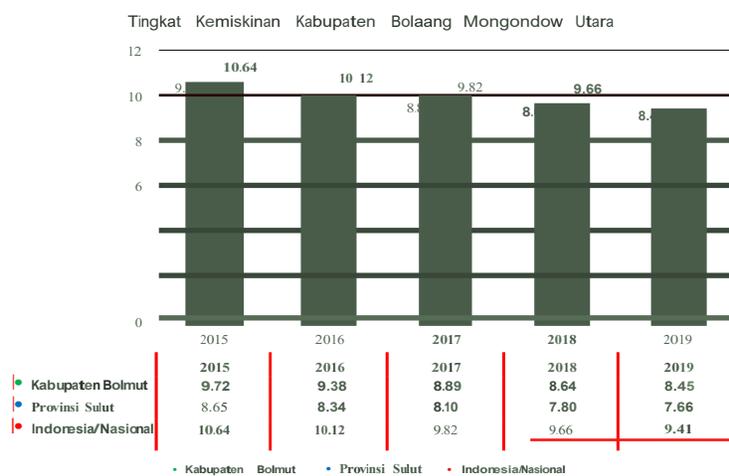
Daya beli masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum lebih baik jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya jalan untuk menuju sasaran ideal berupa pembangunan manusia seutuhnya yang ditandai meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat masih memerlukan kerja keras untuk meningkatkannya.

**Tingkat Kemiskinan** mengalami penurunan dari 8,64% pada tahun 2018 menjadi 8,45% pada tahun 2019 sedangkan capaian kinerja tahun 2019 mencapai 101,74% dari target yang direncanakan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 masih terdapat 6.770 mengalami penurunan dari jumlah 6.844 jiwa pada tahun 2018. Menurunnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh dua indikator yakni Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Ketahanan Pangan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Analisis Indikator Tujuan Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	persen	8,89	8.60	8.45	101.74	8.11
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
Gini Ratio	ratio	0.35	0.32	0.37	84.38	0.27
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4.71	4.69	4.62	101.49	4.24
Indeks Ketahanan Pangan	poin	75.16	76.00	76.00	100.00	
<b>Rata-Rata</b>					<b>95.29</b>	

Dari data pada grafik terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, walaupun demikian persentase angka kemiskinan tersebut masih diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara, namun berada dibawah tingkat kemiskinan nasional.



Grafik 3.2 Tingkat kemiskinan



Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 dari jumlah 6.770 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sejumlah 3.498 jiwa atau 51,67% tidak bekerja, sejumlah 1.858 jiwa atau 27,44% bekerja pada sektor pertanian dan sejumlah 1.414 jiwa atau 20,89% bekerja pada sektor non pertanian. Kebijakan pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan karena lebih dari separuh penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian.

**Rasio Ketergantungan** pada tahun 2019 mencapai angka 36,18% lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yakni 35,00%.

Keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Rasio Ketergantungan (defendency ratio) ditentukan oleh capaian Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Penguatan Kelompok Keluarga Berencana dan rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

Tabel 3.9

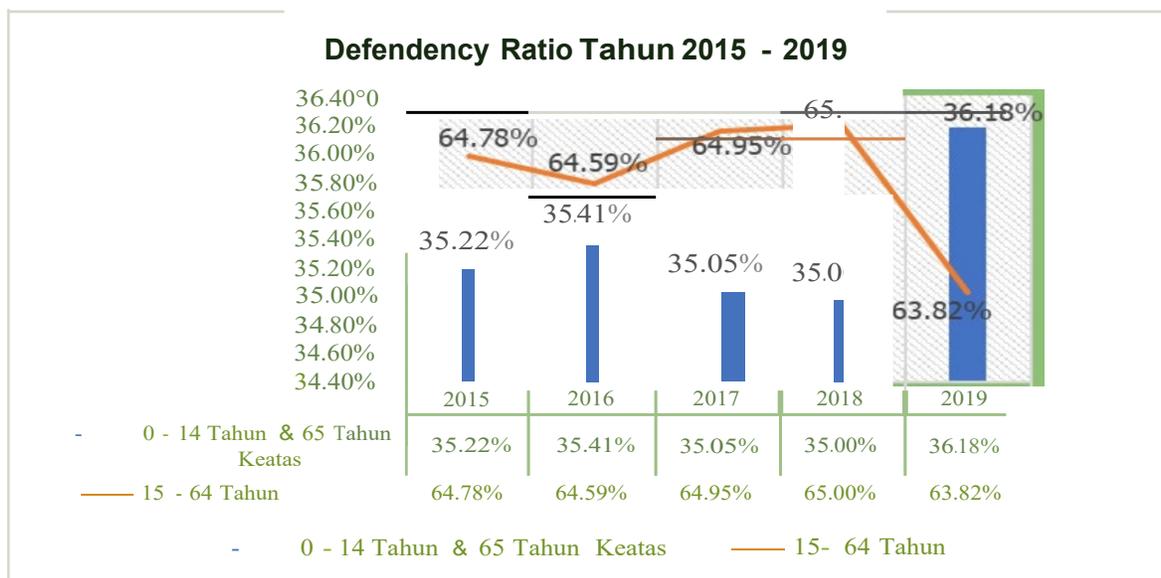
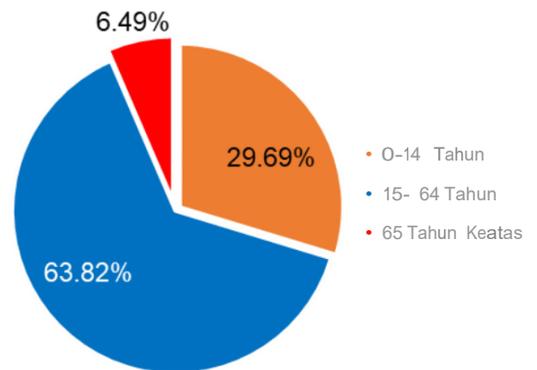
Analisis Indikator Tujuan Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)	persen	61,18	61.15	36.18	148.83	60.87
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
Persentase Penguatan Kelompok Keluarga Berencana	persen	50.00	50.00	75.00	150.00	100.00
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00
<b>Rata-Rata</b>					<b>125.00</b>	

Tingkat capaian kinerja rasio ketergantungan (defendency ratio) pada tahun 2019 dari target 61.15% realisasi 36.18% dengan tingkat capaian 148,83%.

Angka tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk usia non produktif masih jauh lebih kecil daripada jumlah penduduk usia produktif atau dengan kata lain setiap 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 36 jiwa penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, penduduk usia non produktif yakni 0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas berjumlah 29.057 jiwa dan penduduk usia produktif yakni 15 – 64 tahun berjumlah 51.256 jiwa.

Perbandingan Penduduk Usia Produktif dan Usia Non Produktif Tahun 2019



Grafik 3.3. Defendency ratio

Rasio jumlah penduduk usia produktif yang masih jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif merupakan sumberdaya yang potensial. Kuantitas penduduk usia produktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mencapai 63,82% merupakan bonus demografi yang menggambarkan suksesnya kinerja bidang kesehatan dan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sehingga dampak yang terjadi adalah menurunkan proporsi jumlah anak <15 tahun karena penurunan fertilitas, meningkatkan jumlah anak keusia dewasa karena penurunan kematian bayi, terjadi ledakan penduduk usia kerja, dan angka ketergantungan menurun hingga mencapai titik terendah. Kondisi ini disebut *Window of Opportunity* berupa



tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan yang nonproduktif. Dengan kata lain pada saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kebijakan strategis untuk memanfaatkan peluang bonus demografi ini adalah :

- Memanfaatkan suplai tenaga kerja yang besar saat ini dengan memperluas kesempatan kerja produktif, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita;
- Pembedayaan penduduk usia produktif agar mampu mengakses lapangan kerja, mampu mencipta lapangan kerja, dan mampu bersaing secara global;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

## Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Tujuan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

*Indeks Reformasi Birokrasi* pada tahun pada tahun 2019 mencapai angka 60,05 lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yakni yakni 55,00. Capaian kinerja tahun 2019 ditargetkan 57 point dapat dicapai 60,05 point atau tingkat capaian **105,35%**. Keberhasilan pencapaian tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi ditunjang oleh keberhasilan pencapaian 4 (empat) indikator yakni Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indeks Pelayanan Publik dengan masing-masing capaian sebagai berikut :



Tabel 3.10

Analisis Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2019			Target RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	55,00	57.00	60.05	<b>105.35</b>	62.00
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1 Opini BPK	point	4.00	4.00	4.00	100.00	4.00
2 Nilai LPPD	nilai	2.836	2.937	3.040	103.514	3.010
3 Nilai LKIP	point	4.00	4.00	4.00	100.00	6.00
4 Indeks Pelayanan Publik	point	3.27	3.30	n.a	n.a	3.43
<b>Rata-Rata</b>					<b>101.17</b>	

Keterangan :

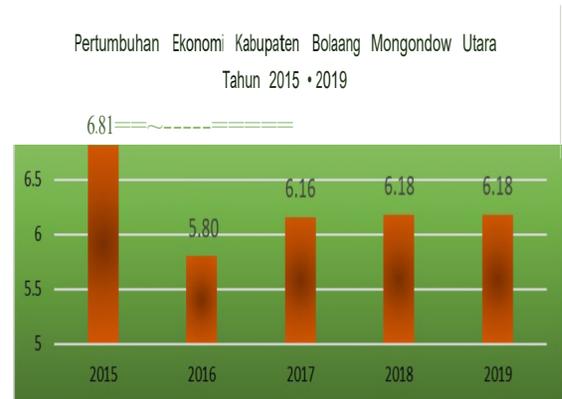
Opini BPK : 4 = Wajar Tanpa Pengecualian      3 = Wajar Dengan Pengecualian  
              3 = Tidak Wajar                                      1 = Tidak Memberikan Pendapat.

Nilai LKIP : 7 = AA      6 = A      5 = BB      4 = B      3 = CC  
              2 = C      1 = D

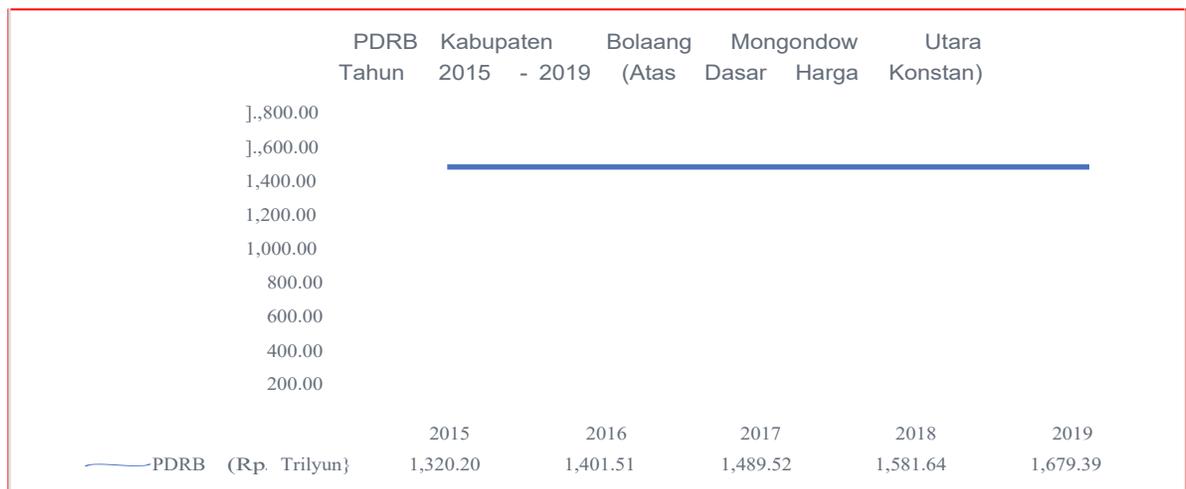
### Tujuan 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan

Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan diukur Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan.

**Laju pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur dari pertambahan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,18% dapat tumbuh pada angka yang sama tahun 2019. Sedangkan capaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang ditargetkan 6,20% hanya dapat tercapai 99,52%.



Namun demikian hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih bersifat angka sementara. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dapat dicapai sesuai target yang direncanakan tidak luput dari peran atau kontribusi beberapa sector yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB seperti sektor pertanian yang mempunyai kontribusi 45,61%, sektor konstruksi yang berkontribusi 14,91% dan sector pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 11,10%.



Grafik 3.4. PDRB Kabupaten Bolmut



Bedasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa PRDB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan yang positif.

Keberhasilan pencapaian tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan ditunjang oleh keberhasilan pencapaian 6 (enam) indikator yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB yakni pertanian dan sektor potensial yakni pariwisata, Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

Tabel 3.11

Analisis Indikator Tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2019			Target RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	persen	6,18	6.20	6.18	<b>99.68</b>	6.24
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	29.14	30.97	43.76	141.31	38.29
2 Nilai Tukar Petani	persen	94.56	95-100	93.34	98.25	>100
3 Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	persen	8.60	9.14	7.23	79.10	11.30
4 Nilai Tukar Nelayan	persen	98.56	100.00	n.a	n.a	>100
5 Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	persen	0.29	0.30	0.28	93.31	0.50
6 Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	persen	0.68	0.70	0.80	113.61	1.00
<b>Rata-Rata</b>					<b>105.12</b>	



## Tujuan 4. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan

Tujuan meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan diukur dengan indicator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Indikator ini belum dilakukan pengukuran karena belum adanya data hasil survey yang dilakukan oleh instansi terkait. Tabel berikut dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja Utama yang menunjang pencapaian tujuan meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan yakni Cakupan Universal Acces, Persentase Pemenuhan Infrastruktur, Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 3.12

Analisis Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2018	2019			Target RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	67,57	68,43	n.a	n.a	74,79
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1 Cakupan <i>Universal Acces</i>	persen	67.85	74.28	79.00	106.35	95.00
2 Persentase pemenuhan infrastruktur	persen	70.50	71.50	71.50	100.00	72.13
3 Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	persen	79.38	83.00	79.00	95.18	82.00
4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH )	persen	33.33	33.33	80.55	241.67	80.55
<b>Rata-Rata</b>					<b>135.80</b>	

*Cakupan Universal Acces* adalah sebuah komitmen pemerintah untuk menjamin 100% ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Secara nasional program ini ditargetkan tuntas pada tahun 2019, namun tidak demikian bagi beberapa daerah termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang masih keterbatasan pendanaan dari sumber APBD. Tahun 2019 Cakupan Universal Access di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditargetkan



74,28% terealisasi 79% dengan tingkat capaian 106,35%, atau meningkat 4,72% dari tahun 2018.

**Persentase Pemenuhan Infrastruktur** pada tahun 2019 ditargetkan 71,50%, terealisasi 71,50% atau tingkat capaian 100%. Capaian pemenuhan infrastruktur ditunjang oleh kinerja pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap ditargetkan tahun 2019 sebesar 53%, terealisasi 54,26% dengan capaian 102,38%. Persentase daerah irigasi kabupaten kondisi baik ditargetkan 90,00% terealisasi 90,00% dengan tingkat capaian 100,00%. Kinerja pemenuhan infrastruktur pada tahun 2019 mengalami peningkatan 1,00% dari tahun tahun 2018.

**Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW** sebagai salah satu indikator penentu keberhasilan tujuan meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan pada tahun 2019 ditargetkan 83,00% terealisasi 79,00% dengan tingkat capaian 95,18%. Kinerja yang diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan menunjukkan masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan sebesar 21,00%. Kinerja kepatuhan terhadap RTRW pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan 0,38% dari kondisi tahun 2018.

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH )** ditentukan dari pengukuran 3 (tiga) komponen yakni indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks pencemaran air pada tahun 2019 ditargetkan 60,00% pada tahun 2019, realisasi 81,05% dengan tingkat capaian 135,08%. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 55%.

Indeks pencemaran udara pada tahun 2019 ditargetkan 60,00% realisasi 93,70% dengan tingkat capaian kinerja 156,28%. Kondisi ini jauh lebih baik dari indeks pencemaran udara tahun 2018 yakni 53,00%. Masih kurangnya aktifitas industry, tingkat kepadatan kendaraan yang masih rendah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat dari aspek Kesehatan lingkungan menjadi faktor penunjang baiknya kualitas udara.

Indeks kualitas tutupan lahan yang menjadi variabel ketiga penentuan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 ditargetkan 60,00% realisasi 70,26% atau tingkat capaian 117,10%. Kondisi ini jauh lebih tinggi dari tahun 2018 yakni 48,00%.



## Sasaran Strategis 1

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99,55% kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

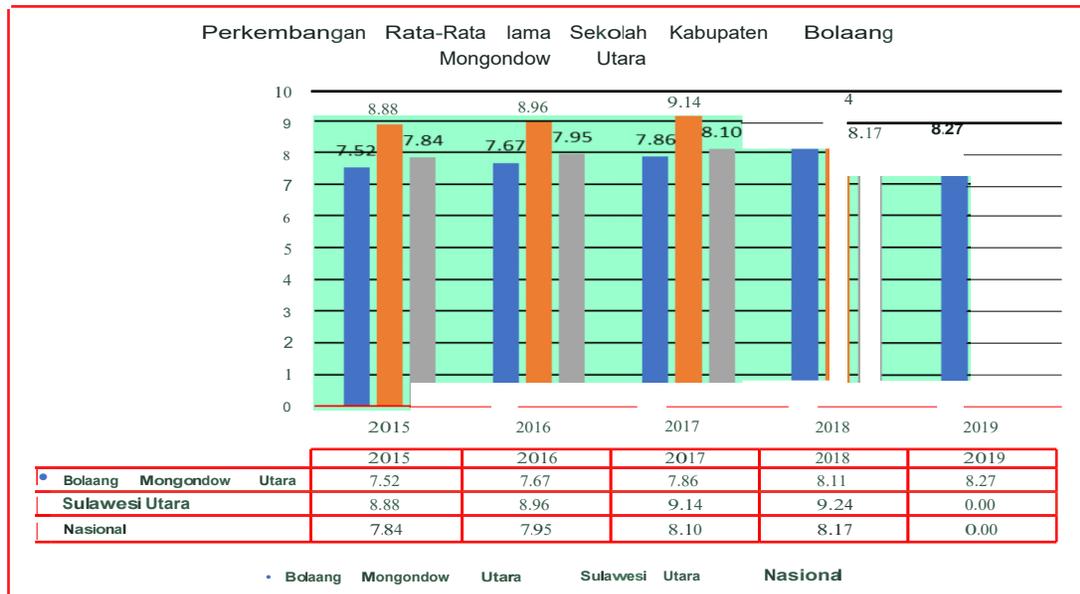
Tabel 3.13

Analisis sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8.11	8.16	8.27	101.35	8.52
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	11.88	11.89	11.91	100.17	12.04
	Angka Melek Huruf (AMH)	persen	99.61	100.00	99.86	99.86	100.00
	Angka Kelulusan SD/MI Sederajat	persen	98.00	100.00	98.62	98.62	100.00
	Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat	persen	98.00	100.00	97.76	97.76	100.00
<b>Rata-Rata</b>						<b>99.55</b>	

### 1) Rata-rata Lama Sekolah

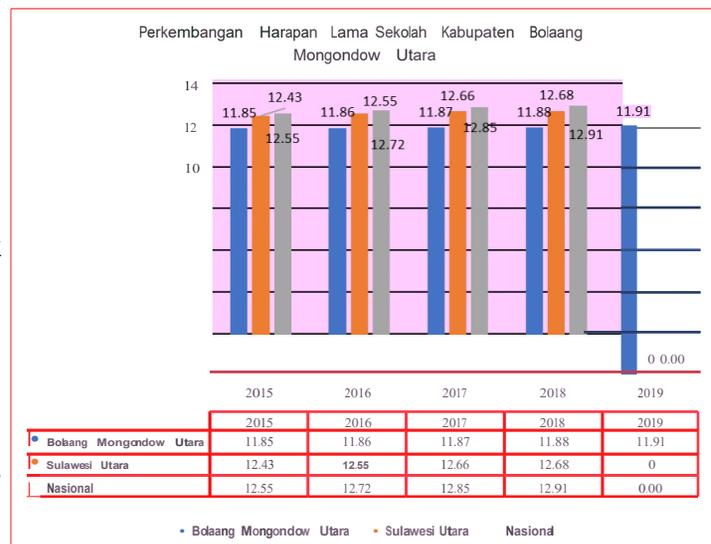
Rata-rata lama sekolah adalah komponen pembentuk IPM dari dimensi Pendidikan. Pada tahun 2019 ditargetkan 8,16 tahun, realisasi 8,27 tahun dengan tingkat capaian 101,35% atau meningkat 0,16 tahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,27 tahun atau setara kelas 2 SMP/ sederajat.



Grafik 3.5 Rata-rata lama sekolah

## 2) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah pada tahun 2019 mencapai angka 11,91 atau meningkat 0,3 point dari tahun 2018, ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peluang bersekolah selama 11,91 tahun atau setara kelas 2 SLTA/ sederajat.



Dilihat dari kedua indikator tersebut, tampak bahwa usaha pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlahan telah membuahkan hasil. Sebagaimana dimatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota adalah:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (warga negara usia 5 s.d. 6 tahun)



2. Pendidikan Dasar (warga negara usia 7 s.d. 12 tahun)
3. Pendidikan Kesetaraan (warga negara usia 7 s.d. 18 tahun).

Tabel 3.14

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	55%	59,68%	108,51
2.	APK SD/MI/ sederajat	100%	103,39%	103,39
3.	APK SMP/MTs/ sederajat	110%	90,16%	81,96
4.	APM SD/MI/ sederajat	95%	88,56%	93,22
5.	APM SMP/MTs/ sederajat	87%	81,39%	93,55
6.	Angka Putus Sekolah SD/MI/ sederajat	0.10%	0,11%	90,00
7.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/ sederajat	0.5%	0,62%	76,00
8.	Angka Melanjutkan jenjang SD/ sederajat ke jenjang SMP/ sederajat	100%	98,74%	98,74
9.	Persentase sekolah yang memiliki sarana pendidikan lengkap (sesuai standar)	87%	88%	101,15

3) Angka Melek Huruf

Indikator angka melek huruf dengan target pada tahun 2019 sebesar 99.62% dengan tingkat realisasi sebesar 99.86% AMH, atau capaian kinerja 99.86% kategori sangat berhasil, artinya angka melek huruf hanya sebesar 0,12% dari jumlah penduduk +15 Tahun, angka ini jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional adalah sangat baik karena angka melek huruf di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada diatas rata-rata nasional yaitu 96.10%.

4) Angka Kelulusan SD/MI sederajat

Indikator Angka Kelulusan SD/MI sederajat pada tahun 2019 dari target 100.00 % terealisasi 98.62%, dengan capaian sebesar 98.62%. angka kelulusan SD/MI sederajat dari tahun 2019 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yakni 98.00%, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin baik.



5) Angka Kelulusan SMP/MTs sederajat

Indikator Angka Kelulusan SMP/MTs sederajat pada tahun 2019 dari target 100.00% terealisasi 97.76%, dengan capaian sebesar 97.76%. angka kelulusan SMP/MTs sederajat dari tahun 2019 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 98.00%, sehingga dapat disimpulkan tingkat SMP/MTs sederajat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau kualitas Pendidikan dasar semakin mengalami peningkatan dilihat dari tingkat kelulusan setiap tahunnya.

Tabel 3.15  
Meningkatnya mutu pendidik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	2	3	4
Nilai rata-rata Ujian Siswa	62	56	90,32
Angka Kelulusan SD/MI/ sederajat	100%	98,62%	98,62
Angka kelulusan SMP/MTs/sederajat	100%	97,76%	97,76
Angka Partisipasi Warga belajar pada pendidikan Non formal	65%	77,89%	119,83
Persentase Pendidik pada jenjang SD yang memiliki ijazah S.1 dan sertifikat pendidik	65%	77%	102,58
Persentase Pendidik pada jenjang SMP yang memiliki ijazah S.1 dan sertifikat pendidik	75%	92%	102,86
Persentase Pendidik pada jenjang PAUD yang memiliki ijazah S.1 dan sertifikat pendidik	35%	36%	100,47
Persentase sekolah yang menerapkan standar mutu pembelajaran	70%	70%	100,00

(sumber Dinas Pendidikan)

Mengacu pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah melampaui target Nasional bahkan beberapa indikator lainnya setidaknya mendekati capaian indikator provinsi.

- 1) APK SD Kabupaten Bolmut mencapai 90.16% sedangkan target nasional adalah 83.77%.
- 2) APM SMP Kabupaten Bolmut = 85.85% Target Nasional = 73,7%

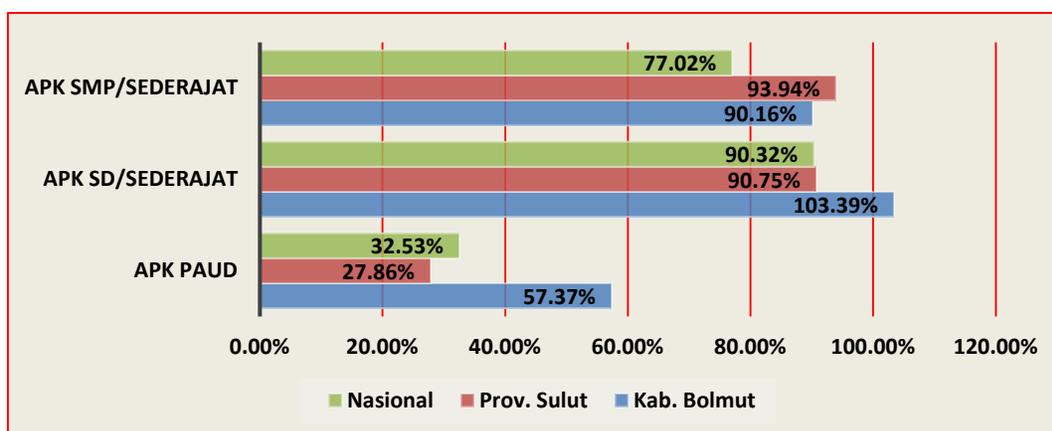


3) Angka Melek Huruf Kabupaten Bolmut = 99,16%, Target Nasional sekurang-kurangnya = 96,10%

Berikut Tabel perbandingan capaian APK dan APM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional.

Grafik 3.2

Perbandingan Capaian APK PAUD/SD/SMP/ sederajat  
Kab. Bolmut, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional



Sumber : Data APK/APM Kemendikbud 2019

## Sasaran Strategis 2

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 "meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" dengan 1 (satu) indikator kinerja "Angka Harapan Hidup" tahun 2019 ditargetkan 66.98 tahun, realisasi 67,21 tahun dengan tingkat capaian 100.33% meningkat 0,23 tahun dari tahun 2018.

Tabel 3.16

Analisis Sasaran 2

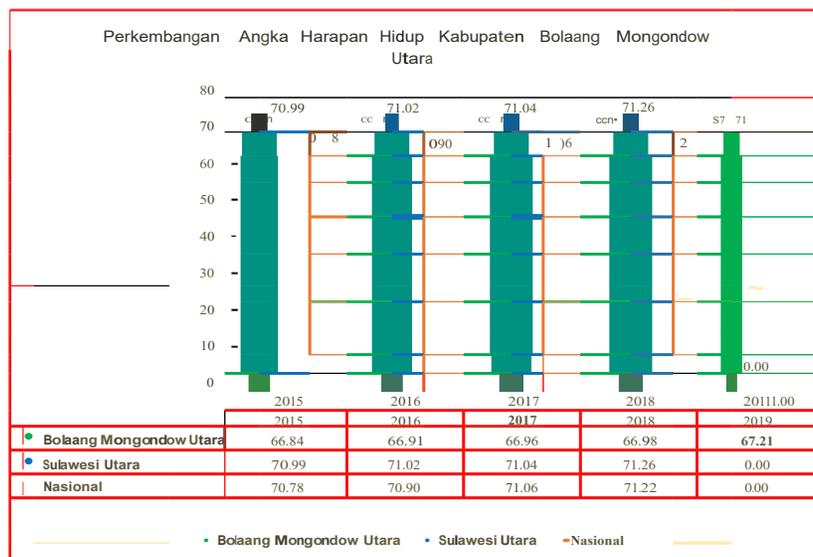
Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2018	2019			Target Kinerja Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	66.98	66.99	67.21	100.33	67.41
<b>Rata - Rata Capaian</b>						<b>100.33</b>	

**Angka Harapan Hidup (AHH)**, adalah salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi kesehatan. Pada tahun 2019, AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat 67,21 tahun meningkat 0,23 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

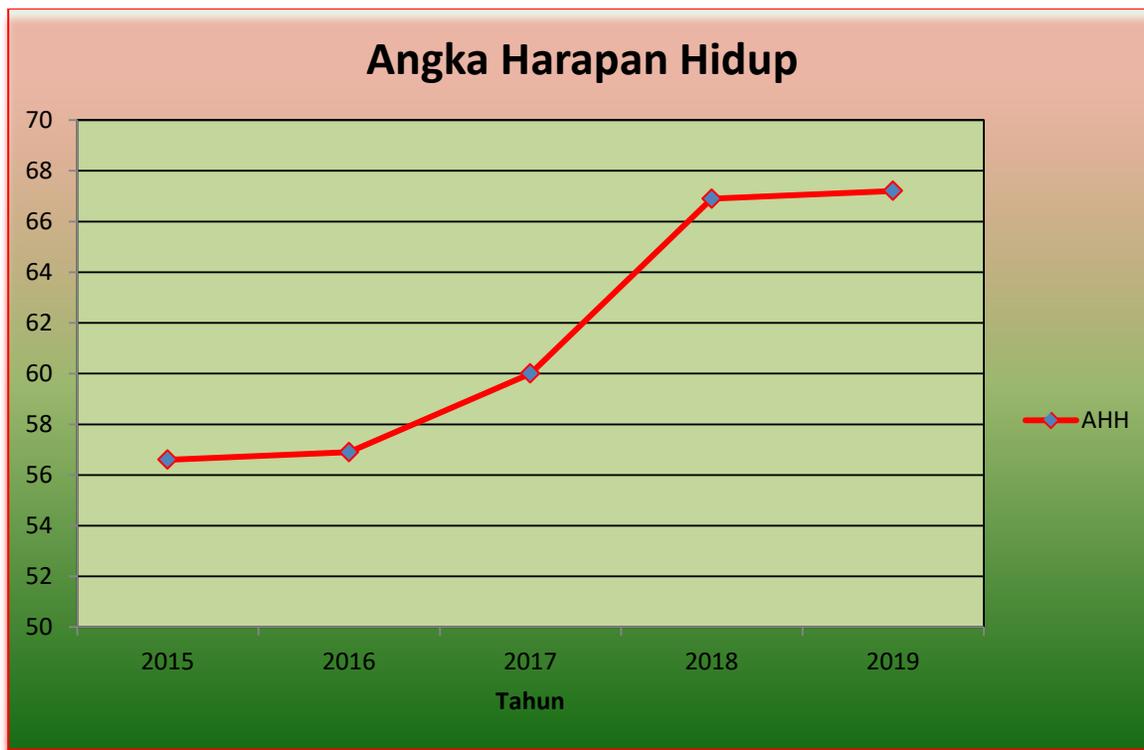
Walaupun Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah angka provinsi dan nasional namun selalu menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Kondisi ini didukung oleh fasilitas kesehatan yang tersedia diantaranya rumah sakit, Puskesmas yang sudah tersebar di seluruh kecamatan, puskesmas pembantu, posyandu, dan polindes. Fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, sebagai fasilitas pelayanan terdekat dengan masyarakat, serta



ditunjang dengan tenaga kesehatan, tenaga keperawatan merupakan tenaga yang terus menjadi prioritas dalam formasi rekrutmen penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir.

Grafik 3.6  
Angka Harapan Hidup



Hal ini berkaitan dengan upaya yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan yakni :

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada lansia terkait UHH (Usia Harapan Hidup) melalui posyandu lansia yang dilakukan rutin setiap bulan, biasanya dengan pemberian makanan bergizi, adanya senam lansia untuk lansia sehat dan produktif
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan dan laboratorium untuk schreening penyakit pada lansia
- 3) Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka upaya kesehatan lansia
- 4) Buku kesehatan lansia untuk lansia umur lebih dari 60 tahun dan lansia risti (umur >70 tahun dengan penyakit penyerta) sebagai sarana untuk memantau kesehatan lansia
- 5) Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian imuniasi, sehingga tubuh memperoleh kekebalan terhadap penyakit tertentu
- 6) Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta kemungkinan adanya gangguan jiwa di masyarakat
- 7) Meningkatkan upaya penanggulangan/pengobatan bila ditemukan penderita penyakit menular maupun tidak menular dan kesehatan jiwa

- 8) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi FKTP (akreditasi Puskesmas)
- 9) FKTP sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
- 10) Peningkatan Akses, sarana, dan prasarana serta Alat Kesehatan
- 11) Penguatan profesionalitas SDM Kesehatan (Sumber Daya Manusia Kesehatan)



mulai dari penguatan knowledge/pengetahuan maupun skill/kemampuan melalui pelatihan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan, misalnya penanganan kegawatdaruratan dan service excellent.

Tabel 3.17

Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan  
di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1
2	Puskesmas Perawatan	6
3	Puskesmas Non Perawatan	5
4	Puskesmas Pembantu	13
5	UPTD Therapeutic Feeding Center (TFC)	1
6	UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	1
7	POSKEDES	32
8	Posyandu	112
9	Apotek	3
10	Toko Obat	2
11	Ambulance	17



### Sasaran Strategis 3

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 100.27% dan termasuk predikat Melampaui Target. Capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18  
Analisis Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3		8	9	10	11	12
1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8.73	8.73	8.87	8.99	101,36	9.43
2.	Gini Ratio	%	0.39	0.35	0.32	0.37	84,38	0.27
Capaian rata-rata		%				92,87		

#### 1) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)

Indikator kinerja utama Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli) target 8.87 realisasi 8.99 dengan capaian 101,36 kategori capaian melampaui target.



Daya beli masyarakat adalah pendapatan nominal dibagi inflasi tahun itu, sehingga inflasi rendah ini jelas meningkatkan daya beli masyarakat, maka daya beli masyarakat bolaang mongondow utara masih terjaga, bahkan bisa menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kuat, sehingga turut mendukung perekonomian daerah.

Dilihat dari kemampuan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang stabil, hal ini ditopang dengan program Dinas Sosial Kabupaten Bolaang mongondow Utara melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan Rehabilitasi Sosial/Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia, bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (bahan makanan), Bantuan Kelompok Usaha Bersama.

## 2) Gini Ratio

Indeks Gini atau Gini Ratio dari target sebesar 0,32 % terealisasi 0,37 %, sehingga capaiannya adalah sebesar 84,38%. Angka realisasi 2019 belum dihitung oleh Badan Pusat Statistik, sehingga menggunakan angka tahun sebelumnya. Realisasi Indeks Gini tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,35. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, termasuk pada kategori ketimpangan moderat. Angka tersebut lebih besar apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0.389% (data BPS per Maret 2018), meskipun lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi SULUT sebesar 0.441% (data BPS Provinsi Sulut per Maret 2018).

Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria  $G < 0,30$  berarti ketimpangan rendah;  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi. Realisasi indeks gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kriteria ketimpangan sedang. Ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih disebabkan tingginya pendapatan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok ekonomi bawah cenderung stagnan.



## Sasaran Strategis 4

Sasaran “Menurunnya beban pengeluaran keluarga” yang dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka terealisasi sebesar 133.90% dengan kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3.19  
Analisis Sasaran 4

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3			7	8	9	10	11	12
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,27	2,95	2,00	3,23	4,69	4,62	101,49	4.24
	Capaian rata-rata	%							101,49	

Analisis capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil pengukuran terhadap sasaran strategis 4 yakni tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikategorikan sangat berhasil dengan capaian sebesar 101,49%. capaian selama 4 (empat) tahun terus mengalami penurunan.

Tabel 3.20  
Partisipasi Angkatan Kerja

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	ANGKATAN KERJA	30.855	34.127	35.094	35.724
	Bekerja	29.945	32.519	33.962	34.617
	Pengangguran Terbuka	910	1.608	1.132	1.107
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)				35.724
2	BUKAN ANGGKATAN KERJA	22.593	21.200	25.798	28.486
	Sekolah	5.478	4.674	6.866	6.203



	Mengurus RT	15.038	14.503	15.901	19.573
	Lainnya	2.077	2.023	3.031	2.710
	Jumlah	53.448	55.327	60.892	64.210
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	57.73	61.68	57.63	55,64
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	2,95	4,71	3,32	3,10

(sumber Disnakertrans Bolmong Utara)

Grafik 3.7  
partisipasi angkatan kerja





## Sasaran Strategis 5

Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan” yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3.21  
Analisis Sasaran 5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3			7	8	9	10	11	12
1.	Opini BPK	predikat	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100	4,00
2.	Nilai LPPD	Poin	2.80	2.8966	3.10	3.0402	2.937	3,040	103,51	3.010
3.	Nilai SAKIP	status	3	3	3	3	4,00	4,00	100	6,00
Capaian rata-rata		%							101,17	

Analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Opini BPK

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2018 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 13A/LHP/XIX.MND/05/2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2019.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tercapai 100%. Opini WTP telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2016.



- a. Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD  
Belum adanya hasil audit laporan keuangan tahun 2019 sehingga Persentase Menurunnya Temuan Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan BMD yang dianalisis adalah berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2018.  
Penyelesaian serah terima asset belum tuntas :
- ✓ Belanja barang dan jasa yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal;
  - ✓ asset tetap tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 33 bidang, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baru mencatat 1 bidang tanah yaitu tanah pelataran terminal tontulow;
  - ✓ Aset tetap Gedung dan bangunan yang diserahkan oleh Pemkab Bolmong 35 unit Gedung dan bangunan, Pemkab baru mencatat 1 unit yaitu Pos jaga Terminal Tontulow;
  - ✓ Terdapat asset BMN Kementerian pertanian, belum dihibahkan.
- b. Tingkat Kepatutan Penyampaian Laporan Keuangan  
c. Tingkat Kepatutan Perencanaan Anggaran  
d. Tingkat Kepatutan Pelaksanaan Anggaran  
e. Menurunnya Temuan SPI  
f. Level Maturitas SPIP  
g. Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI



- h. Persentase Penyajian Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Benar
- i. Presentase Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu
- j. Presentase Propemperda Yang Diajukan Ke DPRD Unuk Ditetapkan Menjadi Perda
- k. Tersedianya Batas Wilayah Administrasi Desa Secara Legal
- l. Persentase Berita Positif Pemerintah Daerah
- m. Presentase Ranperda Yang Ditetapkan Menjadi Perda
- n. Persentase Menurunnya Pelanggaran Trantibmas
- o. Jumlah Kasus Kriminal
- p. Jumlah Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Kepegawaian Berbasis IT
- q. Persentase Manajemen Aparatur Sipil Negara Yang Terlaksana Dengan Baik
- r. Persentase ASN Yang Memiliki Indeks Profesionalitas ASN Kategori Baik
- s. Persentase OPD Yang Menerapkan Tata Kearsipan Sesuai Standar Kearsipan
- t. Jumlah Desa Yang Berprestasi Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Kebersihan Desa
- u. Persentase Desa Yang Mengolah Aset Desa Sesuai Ketentuan
- v. Persentase Desa Yang Menetapkan RKPdes, APBdes, LKPJ Dan LPPD Tepat Waktu
- w. Realisasi PAD
- x. Persentase Kesesuaian Target Dokren-PD Terhadap Target Prioritas Pembangunan Daerah
- y. Persentase Data Pembangunan Yang Dipublikasi

## 2) Nilai LPPD

Indikator nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019 dengan target kinerja 2.937 poin realisasi 3,040 poin capaian 103,51 penilaian Inspektort Provinsi Sulawesi Utara.

Jika melihat capaian tahun 2017 nilai LPPD mencapai 3.0402 dengan predikat tinggi. Keberhasilan capaian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mognondow Utara didukung dengan adanya komitmen pimpinan untuk tetap menjaga akuntabilitas keuangan dan pelayanan public yang baik.

## 3) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 19 Februari 2019. Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 adalah 60.09, predikat "B", dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Hal ini sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1327/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, komposisi nilai untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

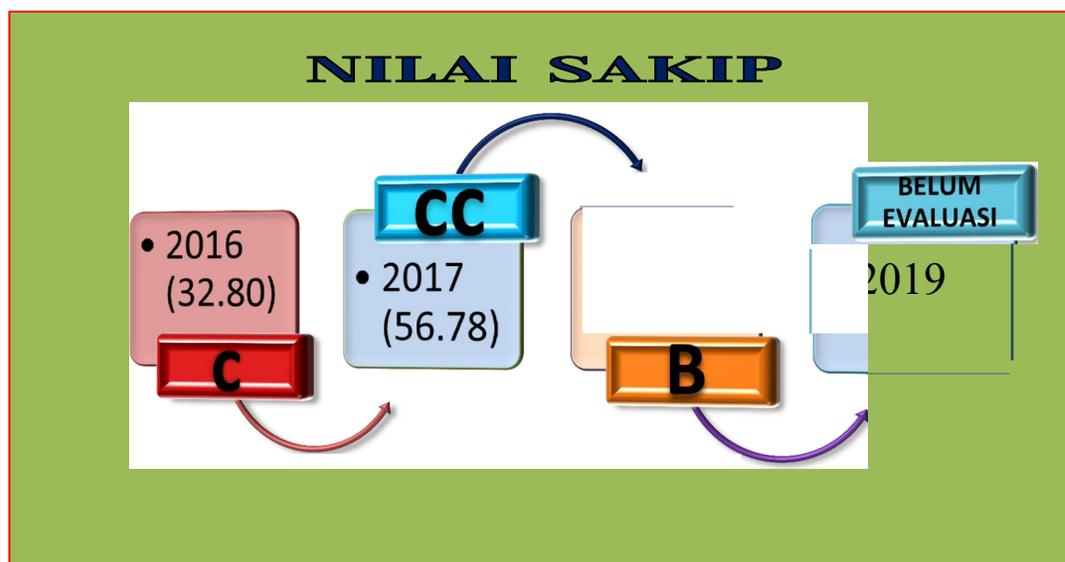
- 1) 5 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat "D"
- 2) 97 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat "C"
- 3) 162 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat "CC"
- 4) 185 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat "B"
- 5) 40 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat "BB"
- 6) 9 Pemerintah Kabupaten/Kota berhasil meraih predikat "A".

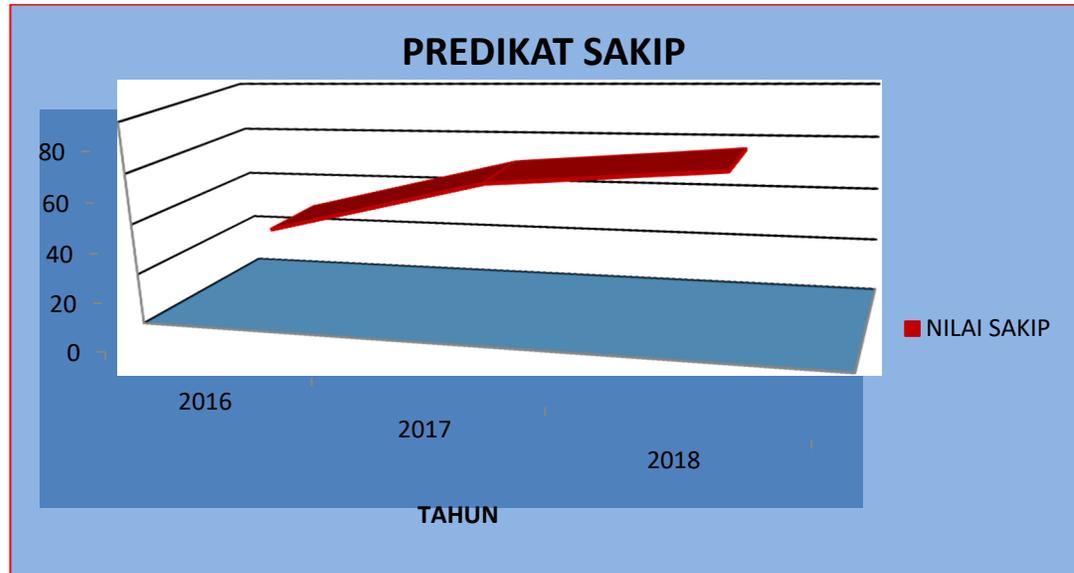


Gambar 3.2. Bupati menerima SAKIP AWARD 2019 diserahkan oleh Mentri PANRB Tjahjo Kumolo.



Gambar 3. Bupati menerima LHE SAKIP 2019 oleh Deputy Akuntabilitas KemenPANRB





Grafik 3.8 Predikat SAKIP



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 6 “Meningkatnya Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, indicator ini saat penyusunan laporan nilainya belum keluar, disebabkan oleh data-data yang dibutuhkan belum semuanya tersedia:

Tabel 3.22  
Analisis Sasaran 6

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	9	10	11	12
1.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,30	n.a	n.a	3.43
Capaian rata-rata		%				

Akan tetapi jika melihat fakta pelayanan public di instansi teknis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:



- 1) Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas.
- 3) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- 4) Semakin meningkatnya budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat, yang dibangun antara lain melalui Budaya Pemerintahan "BOLMUT IDEAL".

### Sasaran Strategis 7

Sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local" yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3.23  
Analisis Sasaran 7

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019 (%)	Target Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	8	9	10	11
1.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	30,97	43,76	141,31	38,29
2.	Nilai Tukar Petani	%	95	93,34	98,25	100
3.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,14	7,23	79,10	11,30
4.	Nilai Tukar Nelayan	%	100	108,11	108,11	>100
5.	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,30	0,28	93,31	0,50
6.	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,70	0,80	113,61	1,00
Capaian rata-rata		%			105,62	



Analisis capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Pada tahun 2019 target 30,97 realisasi sebesar 43,76, dengan capaian kinerja sebesar 141,31%, pertumbuhan sektor pertanian adalah positif.

Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian merupakan salah satu penggerak dalam pengembangan ekonomi rakyat di Bolaang Mongondow Utara.

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan karena banyak menyerap tenaga kerja. Juga membuka peluang usaha intensifikasi dan ekstensifikasi produksi serta diversifikasi pengolahan hasil.

2) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2019 dengan target 100% terealisasi sebesar 108,11% atau realisasi capaian sebesar 108,11% capaian ini kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik mencatatkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara Nasional pada tahun 2019 sebesar 103,88, nilainya diatas rata-rata nasional, angka ini terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga dengan adanya kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani serta penurunan indeks harga yang dibayarkan petani.

3) Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Pergerakan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2019 target 9,14 realisasi sebesar 7,23, dengan capaian kinerja sebesar 79,10%, pertumbuhan sektor Perikanan adalah masih melambat.

Pada tahun 2019 nilai PDRB belum dipublikasi oleh BPS sehingga dalam pengukuran ini menggunakan PDRB tahun 2018 (BPS thn 2018), kontribusi sektor perikanan tahun 2018 ADHK sebesar 46,36%, sub sektor perikanan merupakan top contributor pembentukan nilai tambah dalam perekonomian bolaang mongondow utara, meliputi perikanan laut, perikanan air tawar, perikanan budidaya, keramba dan jaring apung dll.

4) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2019 dengan target 100% terealisasi sebesar 108,11 % atau realisasi capaian sebesar 108,11% capaian ini kategori sangat berhasil.

Badan Pusat Statistik mencatatkan Nilai Tukar Petani (NTN) secara Nasional pada tahun 2019 sebesar 113.53%, angka ini diperoleh dari meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, keramba, dan air tawar.

#### 5) Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB Pada tahun 2019 target 0,30% realisasi sebesar 0,28%, pertumbuhan sektor Akomodasi Dan Makan Minum adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian merupakan salah satu penggerak dalam pengembangan ekonomi rakyat di Bolaang Mongondow Utara.

### Sasaran Strategis 8

Sasaran “Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local” yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 127.80% kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3.24  
Analisis Sasaran 8

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3		8	9	10	11	12
1.	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	60,46	67,85	74,28	79,00	106,35	95,00
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur	%		70,50	71,50	71,50	100	72.13
3.	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	92	94,74	83,00	79,00	95,18	82,00
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%			33,33	80.55	241.67	80,55
Capaian rata-rata		%					127.80	

Analisis indikator kinerja:

1) Cakupan *Universal Access*

Indikator Cakupan Universal Acces dengan target 74,28% terealisasi 79% tingkat capaian sebesar 106,35% predikat melampaui target, walaupun kondisi ini masih jauh dari target universal acces Nasional yakni 100% akan tetapi kinerja indicator ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 60,46%, dan tahun 2018 67,85%.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam RPJMD 2018-2023 bercita-cita diakhir periode renstra tahun 2023 dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Program pembangunan air minum dan sanitasi ditunjang dengan pendekatan Program Pamsimas yang berbasis masyarakat, Partisipatif dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun IPAL Komunal di beberapa Desa. Tolak ukur capaian ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air Limbah. Adapun pada tahun 2019 ditargetkan persentase penduduk berakses air limbah adalah 23%, sementara hasil capaian indikator tersebut pada 2019 adalah 23% sehingga hasil tersebut adalah sesuai dengan target.



Sebagai pendukung untuk mencapai target tersebut dilaksanakan dan direalisasikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah sebagai berikut :

Tabel .3.25

IPAL Yang Terbangun

NO	JENIS IPAL KOMUNAL 2019	KAPASITAS	TEMPAT
1	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Pangkusa
2	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Bolangitang I
3	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Buko Utara



4	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Langi
5	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Kopi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bebas dari kawasan kumuh, hal ini dapat dilihat dari persentase kepadatan penduduk, dimana dengan luas wilayah  $\pm 1.856,86$  km<sup>2</sup>, jumlah penduduk sebesar 79,366 jiwa, maka rasio kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sebesar 42,74% (BPS 2019). Sedangkan sebaran penduduk menunjukkan distribusi yang merata.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat miskin, konstruksi bangunan yang seadanya dan tidak tertata. Sampai dengan tahun 2019 belum terdapat Kawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang teridentifikasi kumuh.

Table 3.26  
Universal Access

Uraian	Satuan	Tahun		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase penduduk berakses air minum	persen	52,50	52,50	79,00
Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	47,80	63,73	23,00
Persentase Kawasan kumuh	persen	0	0	0

## 2) Persentase Pemenuhan Insfrastruktur

Indikator Persentase Pemenuhan Insfrastruktur dengan target 71,50% terealisasi 71,50% tingkat capaian sebesar 100% predikat mencapai target, Kinerja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengembangan wilayah telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), dimana perencanaan pengembangan wilayah sudah bersifat komprehensif, oleh sebab itu setiap wilayah sudah diatur sesuai peruntukan, antara lain setiap pembangunan perumahan harus memiliki sertifikat tanah dan mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB).

Rencana strategisnya bertujuan untuk:

1. Pengendalian pembangunan sesuai peruntukan,
2. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan pengembangan wilayah,
3. Pembangunan sarana prasarana sesuai standar teknis,
4. Pencegahan kerusakan lingkungan dan daerah rawan bencana



3) Persentase Kepatuhan terhadap RTRW

Indikator Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dengan target 83% terealisasi 79% tingkat capaian sebesar 95,18% predikat tidak mencapai target, Untuk mendukung target RPJMD Bolaang Mongondow Utara perihal ketaatan terhadap tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan indikator kinerja yaitu Persentasi Rekomendasi Kesesuaian Ruang. Adapun tolok ukur indikator ini yaitu dapat dilihat dari tingkat jumlah rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan bagi para pengguna. Dari data yang diperoleh, diketahui pada tahun 2019 terdapat 111 rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan dari 141 permohonan yang diajukan oleh para pengguna. Rekomendasi kesesuaian ruang dan pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkala dan intensif merupakan aspek yang menunjang pencapaian ini. Kedepan dalam meningkatkan kesesuaian ruang akan dilaksanakan kegiatan insentif dan disinsentif tata ruang.

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 33,33% terealisasi 80,55% tingkat capaian sebesar 241,67% predikat melampaui target, Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) unsur parameter yang diukur, 1. Indeks



Kualitas Air; 2. Indeks kualitas udara dan 3. Indeks Tutupan Lahan (vegetasi), hasil pengukuran ketiga parameter ini diuraikan dalam table berikut:

Tabel 3.27  
Kualitas Lingkungan

No.	Parameter	satuan	Nilai	Baku Mutu
1.	Indeks Kualitas Air	Nilai	1	Tercemar ringan
2.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,77	Baik
3.	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	70,26	Baik

- Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai dengan sampel di 5 titik Sungai di Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut. Dengan menggunakan formulasi penghitungan indeks pencemaran air sungai maka diperoleh nilai indek sebesar 35,67 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim hujan, dan nilai sebesar 47 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim kemarau. Apabila diambil nilai rata-rata hasil pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau diperoleh nilai indeks pencemaran air sungai sebesar 1, yang jika dikategorikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA) maka masuk dalam predikat BAIK.
- Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Ibukota Kaidipang Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Kecenderungan penurunan kualitas udara telah terlihat dengan data indeks kualitas udara yang semakin menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Indeks Kualitas Udara (IKU), pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu ozon, partikel, karbon monoksida (CO), sulfurdiodoksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun pada saat ini penghitungan IKU baru menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.
- Penghitungan indeks tutupan hutan/vegetasi merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2019 penghitungan luasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 1.856,86 ha, jumlah penduduk 79.366 jiwa.



### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini memperlihatkan bahwa manajemen kinerja keuangan sudah memuaskan. Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk tahun anggaran 2019 pemeriksaan rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belum dilaksanakan, sehingga gambaran akuntabilitas keuangan yang disajikan berikut ini masih bersifat sementara dan bersumber dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang telah diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk pelaksanaan audit rinci.

APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara pada konteks Pemerintah Daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian target PAD pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### 3.4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 ditargetkan Rp.677.294.651.578,00 terealisasi Rp.671.808.494.004,71 atau 99,19%. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 3.28**  
**Capaian PAD Tahun 2019**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Pajak Hotel	80,000,000.00	58,129,000.00	72.66
2	Pajak Restoran	650,000,000.00	987,015,191.00	151.85
3	Pajak Hiburan	1,000,000.00	0.00	0.00
4	Pajak Reklame	150,000,000.00	167,407,274.00	111.60
5	Pajak Penerangan Jalan	1,700,000,000.00	1,843,810,803.00	108.46
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,000,000,000.00	712,530,216.46	71.25
7	Pajak Bumi dan Bangunan	950,000,000.00	1,030,864,836.00	108.51
8	BPHTB	40,000,000.00	307,429,900.00	768.57
9	Retribusi Jasa Umum	2,203,750,000.00	1,132,482,518.00	51.39
10	Retribusi Perizinan Tertentu	58,500,000.00	30,195,000.00	51.62
11	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	1,055,651,225.00	1,055,651,225.00	100.00
12	Penerimaan Jasa Giro	750,000,000.00	905,765,694.25	120.77
13	Penerimaan Bunga Deposito	2,000,000,000.00	3,413,120,329.00	170.66
14	TGR	1,629,056,586.00	3,373,100,062.33	207.06
15	Denda Keterlambatan	1,000,000.00	707,845,439.50	70784.54
16	Pendapatan dari Pengembalian	362,040,066.00	362,040,066.00	100.00
17	Lain-lain PAD Yang Sah	126,488,005.00	110,853,914.17	87.64
18	Pendapatan Dana Kapitasi	8,350,226,998.00	7,964,630,235.00	95.38
<b>Jumlah</b>		<b>21,107,712,880.00</b>	<b>24,162,871,703.71</b>	<b>114.47</b>

Sumber : LKPD 2019



Capaian Pendapatan Daerah Asli Daerah (PAD) dapat digambarkan bahwa dari tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.107.712.880,00. terealisasi Rp24.162.871.703,71 atau tingkat capaian sebesar 127,37%.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.29**  
**Capaian Pendapatan Transfer**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	545,347,607,000.00	532,804,642,934.00	97.70
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	84,800,784,000.00	84,800,247,000.00	100.00
3	Lainnya	15,076,008,053.00	15,822,127,407.00	104.95
	Jumlah	645,224,399,053.00	633,427,017,341.00	98.17

Sumber : LKPD 2019

Capaian target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 dari total yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp545.347.607,00 dapat direalisasikan sebesar Rp532.804.643.934,00 atau 96,99% terdapat Rp12.542.964.066,00 atau 2,30% yang tidak terealisasi.

Komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang Sah yakni pendapatan hibah, dapat dilihat pada dibawah ini :

**Tabel 3.30**  
**Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	10,962,539,645.00	14,218,605,000.00	129.70
	Jumlah	10,962,539,645.00	14,218,605,000.00	129.70

Sumber : LKPD 2019



Capaian target pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp10.962.539.645,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.218.605.000,00 atau tingkat capaian sebesar 129,70%.

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019 berdasarkan obyek dan rincian obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.31**  
**Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Uraian	Tahun 2019		Capaian %
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	<b>677,294,651,578.00</b>	<b>671,808,494,044.71</b>	99.19
PAD	<b>21,107,712,880.00</b>	<b>24,162,871,703.71</b>	114.47
Pendapatan Pajak Daerah	4,571,000,000.00	5,107,187,220.46	111.73
Pendapatan Retribusi Daerah	2,262,250,000.00	1,162,677,518.00	51.39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,055,651,225.00	1,055,651,225.00	100.00
Lain-Lain PAD Yang Sah	13,218,811,655.00	16,837,355,740.25	127.37
PENDAPATAN TRANSFER	<b>645,224,399,053.00</b>	<b>633,427,017,341.00</b>	98.17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	545,347,607,000.00	532,804,642,934.00	97.70
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	84,800,784,000.00	84,800,247,000.00	100.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	15,076,008,053.00	15,822,127,407.00	104.95
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<b>10,962,539,645.00</b>	<b>14,218,605,000.00</b>	129.70
Pendapatan Hibah	10,962,539,645.00	14,218,605,000.00	129.70

Sumber : LKPD 2019



### 3.4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP 58 Tahun 2005 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, definisi belanja ini sama dengan definisi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah meliputi belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2019 mencapai 97,97 % dari total yang dianggarkan sebesar Rp.341.332.419.566,51 atau terealisasi sebesar Rp.334.410.005.481,00.

Persentase dari setiap jenis belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2019

No.	Uraian	Tahun 2019		Capaian %
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	202,941,781,383.00	201,091,039,191.00	99.09
2	Belanja Hibah	6,596,450,000.00	4,524,462,500.00	68.59
3	Belanja Bantuan Sosial	2,531,000,000.00	352,000,000.00	13.91
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	654,925,000.00	577,003,686.00	88.10
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	127,228,401,138.51	127,086,205,104.00	99.89
6	Belanja Tak Terduga	1,379,862,000.00	779,295,000.00	56.48
Jumlah		341,332,419,521.51	334,410,005,481.00	97.97



Sumber : LKPD 2019

## 2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana kerja SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur dan belanja beasiswa pendidikan. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp356.863.389.298,27 terealisasi Rp.320.733.806.198,54 atau tingkat capaian 98,88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.33  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	428,615,000.00	404,209,323.00	94.31
2	Belanja Barang Jasa	185,571,456,181.00	165,838,618,449.54	89.37
3	Belanja Modal	170,863,318,117.27	154,490,978,426.00	90.42
	<b>Total Belanja</b>	<b>356,863,389,298.27</b>	<b>320,733,806,198.54</b>	<b>89.88</b>

Sumber : LKPD 2019



Dari tabel diatas juga dapat di jelaskan bahwa belanja langsung tahun anggaran 2019 di dominasi oleh belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp185.571.456.181,00 atau sebesar 51,71% dari total belanja langsung, sedangkan modal sejumlah Rp170.863.318.117,27 atau sebesar 48,17% dan pada pos belanja pegawai sebesar Rp428.615.000,00 atau sebesar 0,13% dari jumlah belanja langsung. Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi anggaran dan dan proporsi belanja daerah terhadap total belanja APBD pada tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.34

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
TA. 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	341,332,419,566.51	334,410,005,481.00	97,97
2	Belanja langsung	356,863,389,298.39	320,745,246,229.54	89,88
	<b>Total Belanja</b>	<b>698,195,808,864.90</b>	<b>655,155,251,710.54</b>	<b>93,83</b>

Tabel 3.35

Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung  
Terhadap Total Belanja Daerah TA. 2019

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja tidak langsung	334,410,005,481.00	51.04
Belanja langsung	320,733,806,198.54	48.96
<b>Total Belanja</b>	<b>655,143,811,679.54</b>	<b>100.00</b>

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp320.733806.198,54 atau 48,96% dari total belanja daerah, sedangkan proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp.334.410.005.481,00 atau 51,04%.



### 3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target APBD yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah;
2. Masih kurangnya kerjasama lintas Perangkat Daerah pengelola Pajak dan retribusi daerah;
3. Pada sektor Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang memanfaatkan dana APBN dan APBD Provinsi terkendala pada tahapan penagihan;
4. Masih kurangnya potensi pajak dan retribusi daerah sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah;
5. Pada sektor PBB banyak terdapat potensi yang belum terdata;
6. Pajak Bumi dan Bangunan belum melakukan *update* data perihal perubahan objek.

Tabel 3.36

Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2019 per Program

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43,683,686,451.00	40,996,102,802.00	93.85	2,687,583,649.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36,324,811,065.27	34,307,409,257.55	94.45	2,017,401,807.72
3	Program peningkatan disiplin aparatur	859,716,200.00	845,996,000.00	98.40	13,720,200.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,599,289,720.00	5,025,492,898.00	89.75	573,796,822.00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	1,085,142,100.00	1,029,017,074.00	94.83	56,125,026.00



	capaian kinerja dan keuangan				
6	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	37,136,861,000.00	36,981,960,873.00	99.58	154,900,127.00
7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	7,602,134,400.00	7,032,767,997.00	92.51	569,366,403.00
8	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,687,000,400.00	1,480,568,152.00	87.76	206,432,248.00
9	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	4,639,281,500.00	4,361,850,695.00	94.02	277,430,805.00
10	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	494,085,300.00	480,413,007.00	97.23	13,672,293.00
11	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	45,434,000.00	44,997,000.00	99.04	437,000.00
12	Program peningkatan pelayanan kedinasan wakil kepala daerah	3,575,461,450.00	3,315,419,872.00	92.73	260,041,578.00
13	Program peningkatan iman dan taqwa	1,151,667,100.00	1,115,992,646.00	96.90	35,674,454.00
14	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	66,649,600.00	23,166,700.00	34.76	43,482,900.00
15	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	77,167,000.00	71,998,900.00	93.30	5,168,100.00
16	Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem Dan Prosedur Organisasi	130,229,700.00	122,888,900.00	94.36	7,340,800.00
17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	413,356,400.00	383,216,400.00	92.71	30,140,000.00
18	Program Keluarga Berencana	3,453,054,775.00	2,333,803,113.00	67.59	1,119,251,662.00
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,767,430,500.00	2,677,365,515.00	96.75	90,064,985.00
20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	909,212,700.00	879,286,277.00	96.71	29,926,423.00
21	Program pembangunan jalan dan jembatan	4,229,055,000.00	4,159,517,100.00	98.36	69,537,900.00



22	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,376,956,800.00	76,808,910.00	2.27	3,300,147,890.00
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	920,119,500.00	912,174,240.00	99.14	7,945,260.00
24	Program Penataan Administrasi Kependudukan	900,204,000.00	874,575,085.00	97.15	25,628,915.00
25	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	125,355,000.00	118,846,000.00	94.81	6,509,000.00
26	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,902,709,700.00	1,205,882,034.00	63.38	696,827,666.00
27	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	231,000,000.00	6,000,000.00	2.60	225,000,000.00
28	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	11,933,200.00	10,333,200.00	86.59	1,600,000.00
29	Program pengembangan data/informasi	286,054,000.00	285,292,894.00	99.73	761,106.00
30	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	141,190,500.00	140,967,000.00	99.84	223,500.00
31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,959,292,400.00	1,947,253,000.00	99.39	12,039,400.00
32	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	159,353,600.00	149,167,300.00	93.61	10,186,300.00
33	Program Pengembangan Nilai Budaya	789,937,400.00	567,329,600.00	71.82	222,607,800.00
34	Program pengembangan pemasaran pariwisata	659,818,400.00	656,503,829.00	99.50	3,314,571.00
35	Program Pengembangan Perumahan	349,723,250.00	343,656,700.00	98.27	6,066,550.00
36	Program pengembangan wilayah transmigrasi	47,495,700.00	41,203,300.00	86.75	6,292,400.00
37	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,575,557,350.00	1,537,180,800.00	97.56	38,376,550.00
38	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31,877,150.00	31,641,050.00	99.26	236,100.00
39	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	68,845,700.00	65,674,400.00	95.39	3,171,300.00



40	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	224,188,400.00	223,233,800.00	99.57	954,600.00
41	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	215,407,600.00	206,262,100.00	95.75	9,145,500.00
42	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1,483,773,543.00	1,436,869,374.00	96.84	46,904,169.00
43	Program Kerjasama Pembangunan	212,696,100.00	166,940,556.00	78.49	45,755,544.00
44	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	201,983,600.00	198,576,081.00	98.31	3,407,519.00
45	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,793,882,000.00	2,793,798,700.00	100.00	83,300.00
46	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	170,399,000.00	158,358,820.00	92.93	12,040,180.00
48	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	191,196,600.00	180,280,500.00	94.29	10,916,100.00
49	Program pengembangan destinasi pariwisata	2,888,121,000.00	1,549,071,132.00	53.64	1,339,049,868.00
50	Program pengembangan industri kecil dan menengah	244,194,900.00	242,826,090.00	99.44	1,368,810.00
51	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	102,433,800.00	101,653,800.00	99.24	780,000.00
52	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	75,841,200.00	75,406,177.00	99.43	435,023.00
53	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	819,504,800.00	746,174,227.00	91.05	73,330,573.00
54	Program peningkatan peran serta kepemudaan	874,111,400.00	872,399,900.00	99.80	1,711,500.00
55	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	8,100,000.00	8,100,000.00	100.00	0.00
56	Program Transmigrasi lokal	82,796,900.00	82,387,900.00	99.51	409,000.00
57	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26,919,050,396.00	21,621,409,270.99	80.32	5,297,641,125.01
58	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19,146,023,000.00	17,941,856,538.00	93.71	1,204,166,462.00



59	Program peningkatan pelayanan angkutan	78,759,650.00	69,981,200.00	88.85	8,778,450.00
60	Program Kepala Daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga	56,189,600.00	56,107,200.00	99.85	82,400.00
61	Program pelayanan kontrasepsi	44,028,000.00	42,540,600.00	96.62	1,487,400.00
62	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2,207,262,050.00	1,997,988,385.00	90.52	209,273,665.00
63	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	43,272,700.00	42,222,300.00	97.57	1,050,400.00
64	Program Pengawasan Obat dan Makanan	67,441,600.00	64,681,700.00	95.91	2,759,900.00
65	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	224,764,600.00	128,874,700.00	57.34	95,889,900.00
66	Program pengembangan Kemitraan	206,846,400.00	169,370,094.00	81.88	37,476,306.00
67	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	103,263,600.00	100,590,540.00	97.41	2,673,060.00
68	Program pengembangan wawasan kebangsaan	87,497,500.00	83,192,201.00	95.08	4,305,299.00
69	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,852,050,200.00	2,509,069,387.00	87.97	342,980,813.00
70	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	493,931,400.00	490,536,707.00	99.31	3,394,693.00
71	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	33,799,200.00	0.00	0.00	33,799,200.00
72	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	748,424,590.00	683,688,400.00	91.35	64,736,190.00
73	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	33,463,300.00	32,929,400.00	98.40	533,900.00
74	Program kerjasama informasi dengan mas media	1,586,500,000.00	1,496,526,000.00	94.33	89,974,000.00



75	Program pelayanan perizinan	22,313,100.00	17,039,200.00	76.36	5,273,900.00
76	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	220,283,200.00	207,920,200.00	94.39	12,363,000.00
77	Program Pendidikan Non Formal	4,478,380,700.00	4,355,426,720.00	97.25	122,953,980.00
78	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	19,163,200.00	9,556,500.00	49.87	9,606,700.00
79	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	24,999,500.00	24,999,000.00	100.00	500.00
80	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	253,739,225.00	248,774,525.00	98.04	4,964,700.00
81	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	13,912,500.00	13,912,500.00	100.00	0.00
82	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	407,706,950.00	406,644,800.00	99.74	1,062,150.00
83	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	130,000,000.00	130,000,000.00	100.00	0.00
84	Program E-Government aplikasi dan pengembangan informatika	1,036,079,482.00	942,562,549.00	90.97	93,516,933.00
85	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1,682,400.00	0.00	0.00	1,682,400.00
86	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	113,760,000.00	73,989,084.00	65.04	39,770,916.00
87	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	0.00
88	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	114,378,400.00	108,361,700.00	94.74	6,016,700.00
89	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	271,583,200.00	256,309,280.00	94.38	15,273,920.00
90	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	256,159,900.00	255,637,400.00	99.80	522,500.00
91	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	3,559,165,940.00	3,403,723,595.00	95.63	155,442,345.00



92	Program peningkatan sumber daya manusia pariwisata	521,736,000.00	397,364,600.00	76.16	124,371,400.00
93	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	249,403,325.00	236,275,670.00	94.74	13,127,655.00
94	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	546,822,700.00	471,376,000.00	86.20	75,446,700.00
95	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	17,814,400.00	17,338,400.00	97.33	476,000.00
96	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1,659,831,000.00	1,625,832,000.00	97.95	33,999,000.00
97	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	505,639,000.00	371,812,244.00	73.53	133,826,756.00
98	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	370,918,200.00	367,848,100.00	99.17	3,070,100.00
99	Program pengembangan budidaya perikanan	933,070,890.00	915,786,100.00	98.15	17,284,790.00
100	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1,328,963,200.00	990,650,800.00	74.54	338,312,400.00
101	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,562,599,800.00	3,376,991,800.00	74.01	1,185,608,000.00
102	Program penyederhanaan proses perizinan	40,061,500.00	34,800,000.00	86.87	5,261,500.00
103	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	426,381,900.00	290,311,816.00	68.09	136,070,084.00
104	Program perlindungan dan pemenuhan hak anak	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Program Daerah Agraria	60,228,000.00	55,092,050.00	91.47	5,135,950.00
106	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	88,406,200.00	87,475,005.00	98.95	931,195.00
107	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	506,308,600.00	491,519,466.00	97.08	14,789,134.00
108	Program pendidikan politik masyarakat	27,900,000.00	27,750,000.00	99.46	150,000.00



109	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	238,297,900.00	180,655,360.00	75.81	57,642,540.00
110	Program pengembangan perikanan tangkap	2,141,108,200.00	2,087,544,088.00	97.50	53,564,112.00
111	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	34,555,000.00	34,550,000.00	99.99	5,000.00
112	Program perencanaan pembangunan daerah	2,278,683,650.00	2,174,673,129.00	95.44	104,010,521.00
113	Program perlindungan hak perempuan	161,809,650.00	150,022,550.00	92.72	11,787,100.00
114	Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial	509,278,500.00	465,576,800.00	91.42	43,701,700.00
115	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,229,975,000.00	1,022,442,835.00	83.13	207,532,165.00
116	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	965,714,100.00	857,715,781.00	88.82	107,998,319.00
117	Program peningkatan partisipasi masyarakat	412,044,200.00	411,946,416.00	99.98	97,784.00
118	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1,178,639,000.00	1,107,667,784.00	93.98	70,971,216.00
119	Program perencanaan pembangunan ekonomi	318,578,600.00	308,810,092.00	96.93	9,768,508.00
120	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar	10,962,539,645.00	9,653,905,457.00	88.06	1,308,634,188.00
121	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	64,651,500.00	62,738,020.00	97.04	1,913,480.00
122	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	329,950,000.00	325,296,384.00	98.59	4,653,616.00
123	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	117,066,200.00	94,958,400.00	81.12	22,107,800.00
124	Program perencanaan sosial dan budaya	281,147,200.00	272,915,670.00	97.07	8,231,530.00
125	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	202,935,400.00	148,336,751.00	73.10	54,598,649.00
126	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	148,401,500.00	98,910,000.00	66.65	49,491,500.00



127	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1,984,801,000.00	1,857,227,599.00	93.57	127,573,401.00
128	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	10,784,998,034.00	10,455,200,263.00	96.94	329,797,771.00
129	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	38,532,733,970.00	30,927,868,584.00	80.26	7,604,865,386.00
130	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	250,000,000.00	249,955,000.00	99.98	45,000.00
131	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	50,000,000.00	22,000,000.00	44.00	28,000,000.00
132	Program Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat penampungan Sementara	30,000,000.00	29,984,000.00	99.95	16,000.00
133	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5,956,631,402.00	5,818,209,615.00	97.68	138,421,787.00
134	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	10,527,671,900.00	9,591,763,987.00	91.11	935,907,913.00
135	Program Pengendalian Banjir	597,802,000.00	597,758,700.00	99.99	43,300.00
136	Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial pangan	197,485,000.00	195,683,639.00	99.09	1,801,361.00
137	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4,325,719,145.00	4,314,717,815.00	99.75	11,001,330.00
138	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	115,746,600.00	39,056,000.00	33.74	76,690,600.00
139	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	34,078,200.00	22,549,200.00	66.17	11,529,000.00
140	Program Perencanaan Tata Ruang	2,854,267,500.00	2,801,857,385.00	98.16	52,410,115.00



141	Program Pemanfaatan Ruang	315,800,000.00	292,739,600.00	92.70	23,060,400.00
142	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	739,365,400.00	407,025,061.00	55.05	332,340,339.00
143	Program penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	187,172,850.00	179,838,829.00	96.08	7,334,021.00
<b>JUMLAH</b>		356,863,389,298.27	320,733,806,198.54	89.88	36,129,583,099.73



## BAB IV PENUTUP

Melihat hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019 diatas, maka kami dapat sajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kedepan atas hasil yang dicapai melalui kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPJMD periode tahun 2018-2023.

Laporan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2019, diperoleh **sebesar 108,02%**, dengan pernyataan capaian kinerja **sangat berhasil**;
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun 2019 belum ada rilis resmi, akan tetapi jika menggunakan opini tahun 2018 maka akuntabilitas keuangan memperoleh opini WTP;
3. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 dikategorikan sangat berhasil;
4. Dari hasil analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh 18 indikator kinerja yang dikategorikan sangat berhasil, 2 indikator kategori berhasil, 1 indikator kategori cukup berhasil serta 2 indikator kategori kurang berhasil;
5. Meningkatnya angka perkapita tahun 2019 Bolaang Mongondow Utara sebesar 19,84 juta rupiah, dari angka 18,97 juta rupiah, berarti terjadi pertumbuhan sebesar 0,87%; (PDRB / Badan Pusat Statistik);
6. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2019 sebesar 99,86%, artinya angka buta aksara hanya sebesar 0,61% dari jumlah penduduk +15 tahun sedangkan rata-rata nasional sebesar 2,07%;
7. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2018 sebesar 66,99 tahun meningkat pada tahun 2019 menjadi 67,21 tahun, ini menunjukkan bahwa pola hidup sehat masyarakat di Bolaang Mongondow Utara semakin baik;
8. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;



9. Keberhasilan kinerja tersebut diatas dapat dicapai karena kebijakan pembangunan beberapa tahun terakhir yang lebih diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penggerak ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana bidang pelayanan publik.

Tabel 4.1

Rangkuman Hasil Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

N o	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
1	2	3	4	5
1.	Sangat Berhasil	7	7	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2.	Berhasil	0	9	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3.	Cukup Berhasil	0	1	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4.	Kurang Berhasil	0	3	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.
5.	Tidak Ada Informasi (n.a)	1	3	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	23	

B. Peluang perbaikan

1. Laporan Kinerja ini akan dimanfaatkan sebagai acuan perbaikan kinerja kedepan, terutama pada sisi perencanaan;
2. Melakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disemua level organisasi;



3. Melakukan Rencana Aksi terhadap LHE dan Rekomendasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas evaluasi SAKIP 2019;
4. Segera melakukan rencana aksi terhadap dokumen perencanaan pada SKPD, baik Renstra, RKT dan penyesuaian sasaran, indikator kinerja dan program;
5. Segera melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap realisasi capaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Kepala OPD dengan Bupati;
6. Sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi harus lebih diintensifkan, sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam system pemerintahan di daerah dan berorientasi hasil yang paripurna;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 ini, kiranya dapat menciptakan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government* demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.

Boroko,       Maret 2020

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**DEPRI PONTOH**